KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR B.1389/SJ/KP.310/XI/2026

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka mengisi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mengajak Putra/Putri terbaik bangsa yang berkompeten untuk bergabung bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (PNS KKP) Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
   c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
   d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026;
   e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1709 Tahun 2026 tentang Penyederhanaan Persyaratan Pelamaran Sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

2. Kebutuhan Pengadaan PNS KKP Tahun Anggaran 2026, dibagi menjadi:
   a. kebutuhan umum; dan
   b. kebutuhan khusus, terdiri dari:
      1) penyandang disabilitas; dan
      2) putra/putri Papua.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Rincian kebutuhan umum Pengadaan PNS KKP Tahun Anggaran 2026, terdiri atas informasi nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi, unit organisasi penempatan, dapat/tidak dapat diisi disabilitas, deskripsi jabatan, dan rentang penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

4. Rencana unit organisasi penempatan pada unit organisasi pengelompokan di dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada Pengadaan PNS KKP Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

5. Rincian kebutuhan khusus Pengadaan PNS KKP Tahun Anggaran 2026 terdiri atas informasi nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi, unit organisasi penempatan, deskripsi jabatan, dan rentang penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

6. Rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 3, 4, dan 5 juga dapat diakses melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

7. Jadwal seleksi pengadaan calon PNS Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	25 November s.d. 9 Desember 2026
2	Pendaftaran Seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3	Seleksi Administrasi	27 November 2026 s.d. 4 Januari 2027
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 s.d. 8 Januari 2027
5	Masa Sanggah	9 s.d. 11 Januari 2027
6	Jawab Sanggah	9 s.d. 13 Januari 2027
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	14 s.d. 16 Januari 2027
8	Pemetaan Lokasi SKD CPNS	17 s.d. 22 Januari 2027
9	Penjadwalan SKD CPNS	23 s.d. 26 Januari 2027
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi SKD CPNS	27 Januari s.d. 1 Februari 2027
11	Pelaksanaan SKD CPNS	2 s.d. 21 Februari 2027
12	Pengolahan Nilai SKD CPNS	17 s.d. 28 Februari 2027
13	Pengumuman Hasil SKD CPNS	1 s.d. 7 Maret 2027
14	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	16 s.d. 17 Maret 2027
15	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta	18 s.d. 20 Maret 2027
16	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	21 s.d. 23 Maret 2027
17	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	24 s.d. 29 Maret 2027
18	Pelaksanaan SKB CPNS	30 Maret s.d. 6 April 2027
19	Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT	3 s.d. 12 April 2027
20	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	13 s.d. 17 April 2027
21	Pengumuman Hasil CPNS	15 s.d. 20 April 2027

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kegiatan	Jadwal
22	Masa Sanggah	21 s.d. 23 April 2027
23	Jawab Sanggah	21 s.d. 24 April 2027
24	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	25 s.d. 28 April 2027
25	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	29 April s.d. 2 Mei 2027
26	Pengisian DRH NIP CPNS	3 s.d. 17 Mei 2027
27	Usul Penetapan NIP CPNS	8 s.d. 22 Mei 2027

8. Persyaratan Pelamaran
   a. Persyaratan umum pelamaran, sebagai berikut:
      1) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
      2) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
      3) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat melamar;
      4) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta pada saat melamar;
      5) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
      6) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sebagai berikut:
         a) Pelamar Lulusan Dalam Negeri
            (1) Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
            (2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(3) akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

b) Pelamar Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki dokumen yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang membuktikan kesetaraan kualifikasi pendidikan dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar.

7) memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan pada saat melamar;
8) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9) tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
10) tidak berstatus sebagai pelamar yang sedang mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai ASN lainnya;
11) tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
12) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan;
13) tidak bertato atau tidak memiliki bekas tato (bagi pelamar laki-laki dan perempuan), tidak bertindik atau memiliki bekas tindik yang berlubang (bagi laki-laki) kecuali karena ketentuan adat; dan
14) bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Persyaratan bagi pelamar pada kebutuhan khusus, sebagai berikut:

1) Penyandang Disabilitas
   a) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnnya; dan
   b) menyampaikan video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
2) Putra/Putri Papua

   Kebutuhan khusus putra/putri Papua dapat dilamar dengan melampirkan bukti, sebagai berikut:
   a) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
   b) surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Jabatan yang mewajibkan sertifikat keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a poin ketujuh, sebagai berikut:

1) Penata Kelola Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Perikanan
Persyaratan wajib tambahan bagi jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Perikanan adalah melampirkan sertifikat Keahlian Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) I atau Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) I. Jabatan ini akan berkarier menjadi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

2) Jabatan Awak Kapal Negara (Kepelautan)

No	Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan		
		Sertifikat	Syarat Kesehatan/ Fisik	Kesehatan Mata
1	Juru Masak Kapal Kelas II	BST *(Basic Safety Training)* atau BST-F (*Basic Safety Training for Fisheries*)	1. Tidak memiliki riwayat penyakit jantung, operasi besar, dan asma; 2. Tidak bertato atau tidak memiliki bekas tato, tidak bertindik atau memiliki bekas tindik yang berlubang kecuali karena ketentuan adat; dan 3. Tinggi badan minimal 160 cm.	Tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak/bebas buta warna dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit/Klinik yang direkomendasikan oleh Kementerian Perhubungan yang lokasinya dapat dilihat pada laman https://maritimhub.kemenhub.go.id/site/bkkp/pelayanan/daftar-faskes.
2	Juru Masak Kapal Kelas III			
3	Juru Minyak Kapal Kelas I	• BST *(Basic Safety Training)* atau BST-F (*Basic Safety Training for Fisheries*) • Minimal ATKAPIN II		
4	Juru Minyak Kapal Kelas II			
5	Juru Minyak Kapal Kelas III	BST *(Basic Safety Training)* atau BST-F (*Basic Safety Training for Fisheries*)		
6	Juru Mudi Kapal Kelas II	• BST (Basic Safety Training) atau BST-F (Basic Safety Training for Fisheries) • Minimal ANKAPIN II		
7	Juru Mudi Kapal Kelas III			
8	Kelasi Kapal Kelas I	• BST (Basic Safety Training) atau BST-F (Basic Safety Training for Fisheries) • Minimal ANKAPIN II		
9	Kelasi Kapal Kelas II			
10	Kelasi Kapal Kelas III	BST *(Basic Safety Training)* atau BST-F (*Basic Safety Training for Fisheries*)		
11	Kelasi Kapal Kelas IV			
12	Masinis III Kapal Kelas II	• BST (Basic Safety Training) atau BST-F (Basic Safety Training for Fisheries) • Minimal ATKAPIN II		

d. Jabatan yang mewajibkan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a poin ke dua belas, sebagai berikut:

No	Jabatan	Syarat Wajib Tambahan
1	Dokter Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR), bukan STR *Internship*
2	Analis Kerja Sama Ahli Pertama	Sertifikat TOEFL ITP dengan skor minimal 500 atau Sertifikat IELTS dengan skor minimal 5,5 yang masih berlaku (maksimal 2 tahun sejak diterbitkan)
3	Penerjemah Bahasa Inggris Ahli Pertama	Sertifikat TOEFL ITP dengan skor minimal 550 atau Sertifikat IELTS dengan skor minimal 6 yang masih berlaku (maksimal 2 tahun sejak diterbitkan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. Tahapan Seleksi

Seleksi pengadaan PNS terdiri terdiri atas 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

a. seleksi administrasi;
b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Penjelasan tahapan seleksi sebagai berikut:

a. Seleksi administrasi dilakukan untuk memvalidasi dokumen pelamaran sesuai dengan persyaratan administrasi dan kualifikasi.
b. SKD dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. SKD menggunakan CAT BKN, yang meliputi:
   1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
   2) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
   3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

   Materi SKD sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026.

   Nilai ambang batas SKD, sebagai berikut:

No	Materi	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	
			Kebutuhan Umum	Kebutuhan Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Papua
1	TWK	30	65	-
2	TIU	35	80	60
3	TKP	45	166	-
	Nilai Kumulatif		-	286

   Ketentuan penggunaan nilai SKD periode sebelumnya sebagai berikut:

   1) pelamar pada pengadaan PNS tahun anggaran 2026 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS periode sebelumnya (tahun anggaran 2024), dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a) melamar di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2024;
      b) melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c) melamar pada jabatan dan/atau instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2026;
d) memenuhi Nilai Ambang Batas SKD tahun anggaran 2026 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
e) dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2026;

2) pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2026;
3) dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2026, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2026;
4) Instansi Pemerintah mengumumkan pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2026 dalam pengumuman hasil seleksi administrasi;
5) pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2026 dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan setelah memenuhi Nilai Ambang Batas SKD tahun anggaran 2026 pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

c. SKB dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

SKB Pengadaan PNS KKP Tahun Anggaran 2026, meliputi:
1) SKB menggunakan CAT BKN (Bobot 50%);
2) SKB Tambahan (Bobot 50%), meliputi:
   a) Tes Potensi dan Kepribadian Karakter;
   b) Tes *Intelligence Quotient* (IQ);
   c) *Situational Judgement Test* (SJT); dan/atau
   d) Tes Pengamatan Fisik dan Kesamaptaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rincian Pembobotan Penilaian SKB berdasarkan pengelompokan jabatan, sebagai berikut:

No	Kelompok Jabatan	SKB CAT BKN	SKB Tambahan			
			Tes Potensi dan Kepribadian Karakter	SJT	Tes IQ	Fisik & Kesamaptaan
1	Jabatan selain awak kapal, dengan kualifikasi pendidikan S-2/ S-1/ D-IV/ Pendidikan Profesi	50% dari total SKB keseluruhan	10% dari total SKB	20% dari total SKB	20% dari total SKB	-
2	Jabatan selain awak kapal, dengan kualifikasi pendidikan D-III, SMA/ SMK/ sederajat		20% dari total SKB	30% dari total SKB	-	-
3	Jabatan awak kapal negara (kepelautan)		20% dari total SKB	-	-	30% dari total SKB

Dalam hal pelamar merupakan peserta pada seleksi pengadaan Sumber Daya Manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang memiliki nilai hasil Tes Potensi Kognitif (TPK) ≥ 120 (lebih besar atau sama dengan 120) diberikan penambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal SKB CAT BKN.

10. Dokumen Persyaratan Pendaftaran Seleksi Administrasi Yang di Unggah
Peserta mengunggah dokumen saat pendaftaran seleksi administrasi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id, yang meliputi:

Persyaratan Umum

a. surat lamaran yang dihasilkan secara otomatis melalui SSCASN dengan format PDF diunduh, ditandatangani (menggunakan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik), serta dibubuhi 1 (satu) meterai (baik meterai tempel atau e-meterai), kemudian diunggah kembali dalam aplikasi. Apabila ditemukan pembubuhan meterai yang tidak sesuai dengan ketentuan maka dinyatakan tidak sah;
b. *scan* transkrip/daftar nilai asli dalam format PDF berwarna **(bukan dokumen fotokopi legalisir)** bagi lulusan perguruan tinggi/sekolah dalam negeri, serta melampirkan surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. bukti akreditasi program studi pada saat tahun kelulusan dalam format PDF;
d. swafoto dilakukan pada saat pembuatan akun dengan pencahayaan yang cukup serta mengenakan pakaian formal dan sopan. Dalam melakukan swafoto, pelamar mengikuti petunjuk pergerakan yang ditampilkan dalam aplikasi SSCASN.

Persyaratan Khusus

a. surat keterangan dalam format PDF berwarna dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasan bagi pelamar kebutuhan khusus disabilitas;
b. tautan video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar bagi pelamar kebutuhan khusus disabilitas;
c. scan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dalam format PDF berwarna bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua;
d. scan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku dalam format PDF berwarna bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua;
e. sertifikat wajib tambahan dalam format PDF berwarna bagi jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan serta awak kapal negara (kepelautan) sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pelamaran pada angka 8 huruf c poin kesatu dan kedua;
f. surat keterangan tidak/bebas buta warna dalam format PDF berwarna dari Rumah Sakit Pemerintah **atau** Rumah Sakit/Klinik yang direkomendasikan oleh Kementerian Perhubungan yang lokasinya dapat dilihat pada laman https://maritimhub.kemenhub.go.id/site/bkkp/pelayanan/daftar-faskes, khusus untuk kelompok jabatan awak kapal negara (kepelautan) sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pelamaran pada angka 8 huruf c poin kedua;
g. Surat Tanda Register dalam format PDF berwarna bagi peserta yang melamar pada kebutuhan jabatan fungsional Dokter Ahli Pertama sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pelamaran pada angka 8 huruf d poin kesatu;
h. scan sertifikat kemampuan bahasa Inggris berupa TOEFL ITP atau IELTS dalam format PDF berwarna pada kebutuhan jabatan fungsional Analis Kerja Sama Ahli Pertama dan Penerjemah Bahasa Inggris Ahli Pertama sebagaimana tercantum dalam Pesyaratan Pelamaran pada angka 8 huruf d poin kedua dan ketiga.

11. Lokasi SKD dan SKB dengan CAT BKN serta SKB Tambahan
    a. Pelaksanaan SKD dan SKB dengan CAT BKN bertempat di Kantor Pusat, Kantor Regional, Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara, atau lokasi mandiri dan lokasi luar negeri yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Pelaksanaan SKB Tambahan berupa Tes Potensi dan Kepribadian Karakter, SJT, dan Tes IQ dilaksanakan secara daring/*online* melalui:
   1) perangkat komputer/laptop yang memiliki kamera dan audio yang aktif untuk mengakses aplikasi SKB Tambahan; dan
   2) perangkat hp/tablet untuk mengakses *zoom meeting* dengan mengaktifkan fitur kamera dan audio yang diarahkan pada pelamar dan layar komputer/laptop sebagai pengawasan pelaksanaan SKB Tambahan.

c. Lokasi Tes Pemeriksaan Fisik dan Kesamaptaan bagi pelamar awak kapal negara (kepelautan) bertempat di Unit Pelaksana Teknis KKP dan akan ditentukan menyesuaikan Lokasi SKB CAT BKN pelamar.

12. Pengolahan Nilai Akhir
   a. Pengolah nilai akhir dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
   b. Ketentuan pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan pengolahan hasil akhir berlaku sebagai berikut:
      1) bagi jabatan pada kebutuhan umum yang belum terpenuhi maka dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit organisasi penempatan/lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
      2) bagi jabatan pada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit organisasi penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
   c. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, setelah dilakukan pengisian kebutuhan sebagaimana huruf b maka dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya dengan ketentuan secara berurutan sebagai berikut:
      1) memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit organisasi penempatan/lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
      2) memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit organisasi penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
   d. Pengisian kebutuhan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra/putri Papua hanya dapat dilakukan oleh pelamar yang melamar pada jenis kebutuhan khusus yang sama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. Pembatalan Kelulusan
    a. Bagi Peserta kelompok Jabatan Awak Kapal (kepelautan) yang telah dinyatakan lulus melalui pengolahan nilai akhir dan melanjutkan proses usul penetapan NIP calon PNS, wajib melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan standar kesehatan kepelautan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut. Apabila dari pemeriksaan kesehatan tersebut tidak memenuhi standar kesehatan kepelautan, panitia akan membatalkan kelulusan yang bersangkutan.
    b. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus melalui pengolahan nilai akhir dan melanjutkan proses usul penetapan NIP calon PNS, wajib melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan apabila rekomendasi dari dokter menyatakan bahwa peserta belum memenuhi syarat/ tidak memenuhi syarat maka panitia akan membatalkan kelulusan yang bersangkutan.

14. Ketentuan Lainnya
    a. prinsip pengadaan ASN KKP adalah kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta **tidak dipungut biaya**;
    b. kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja pelamar itu sendiri. Jika ada pihak yang **menjanjikan kelulusan** dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah **tindak penipuan**;
    c. apabila menemukan tindak penipuan dalam pelaksanaan pengadaan PNS KKP Tahun 2026, harap melaporkan ke disiplin.rosdmao@kkp.go.id;
    d. pelamar **dilarang** membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan Pengadaan Pegawai ASN. Apabila terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    e. bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi calon PNS, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai calon PNS;
    f. apabila ditemukan paham radikalisme pada peserta saat proses pelaksanan seleksi maupun setelah diangkat menjadi calon PNS, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai calon PNS;
    g. apabila terdapat pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 dapat menggantikannya dengan peserta yang dinyatakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

lulus dan memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan PANSELNAS;

h. apabila terdapat pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran Pengadaan Pegawai ASN berikutnya;

i. pelamar yang sudah ditetapkan sebagai calon PNS dilarang mengajukan pindah ke Instansi Pemerintah lain dengan alasan pribadi paling singkat selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak diangkat sebagai calon PNS;

j. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi pengadaan PNS KKP Tahun 2026 dapat menghubungi Layanan Informasi setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB melalui:
   1) Website Resmi https://sdmao.kkp.go.id
   2) *Whatsapp* pada nomor 0851-5889-8203
   3) *Web Chat* https://csai.sdmao-kkp.online/chat
   4) *Telegram Bot* https://t.me/layanan_ai_kkp_bot
   5) *Instagram @rosdmaokkp* atau *@kkpgoid*

Jakarta, 27 November 2026

Sekretaris Jenderal,
selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PNS
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2026

Ditandatangani Secara Elektronik

Andy Artha Donny Oktopura

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I Pengumuman
Nomor : B.1389/SJ/KP.310/XI/2026
Tanggal : 27 November 2026

RINCIAN KEBUTUHAN UMUM
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
1	Analis Akuakultur Ahli Pertama	S-1 Agrobisnis Perikanan | S-1 Agribisnis Perikanan | S-1 Akuakultur | S-1 Biologi | S-1 Bioteknologi | S-1 Budi Daya Perairan | S-1 Budi Daya Perikanan | S-1 Ilmu Perikanan | S-1 Kimia | S-1 Lingkungan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-IV Analis Kimia | D-IV Teknologi Akuakultur	3	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Agrobisnis Perikanan | S-1 Agribisnis Perikanan | S-1 Akuakultur | S-1 Biologi | S-1 Bioteknologi | S-1 Budi Daya Perairan | S-1 Budidaya Perikanan | S-1 Ilmu Perikanan | S-1 Kimia | S-1 Lingkungan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-IV Analis Kimia | D-IV Akuakultur	4	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Agrobisnis Perikanan | S-1 Agribisnis Perikanan | S-1 Akuakultur | S-1 Biologi | S-1 Bioteknologi | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Budidaya Perikanan | S-1 Ilmu Perikanan | S-1 Kimia | S-1 Lingkungan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Sosial Ekonomi | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-IV Analis Kimia | D-IV Teknologi Akuakultur	4	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sei Gelam	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Agrobisnis Perikanan | S-1 Agribisnis Perikanan | S-1 Akuakultur | S-1 Biologi | S-1 Bioteknologi | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Budidaya Perikanan | S-1 Ilmu Perikanan | S-1 Kimia | S-1 Lingkungan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-IV Analis Kimia | D-IV Teknologi Akuakultur	86	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Agrobisnis Perikanan | S-1 Agribisnis Perikanan | S-1 Akuakultur | S-1 Biologi | S-1 Bioteknologi | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Budidaya Perikanan | S-1 Ilmu Perikanan | S-1 Kimia | S-1 Lingkungan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-IV Analis Kimia | D-IV Teknologi Akuakultur | S-1 Perikanan Budidaya	2	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Analis Akuakultur Ahli Pertama	S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Sumber Daya Perairan | S-1 Lingkungan | S-1 Biologi | S-1 Kimia	1	Sekretariat Jenderal | Biro Perencanaan	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi	8.000.000	8.500.000
2	Analis Anggaran Ahli Pertama	D-IV Keuangan | S-1 Administrasi Publik | S-1 Ekonomi | S-1 Ekonomi Pembangunan | S-1 Akutansi | S-1 Manajemen	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Balai Penataan Ruang Laut Makassar	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis dibidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	8.000.000	8.500.000
		S-1 Administrasi Bisnis | D-IV Keuangan | S-1 Administrasi Publik	1	Sekretariat Jenderal | Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis dibidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	8.000.000	8.500.000
		S-1 Administrasi Negara | S-1 Administrasi Publik | D-IV Keuangan	1	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis dibidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	8.000.000	8.500.000
		S-1 Akuntansi | S-1 Manajemen | S-1 Manajemen Keuangan | S-1 Ekonomi Pembangunan | D-IV Akuntansi | D-IV Perpajakan | S-1 Perpajakan	1	Sekretariat Jenderal | Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis dibidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	8.000.000	8.500.000
3	Analis Data Ilmiah Ahli Pertama	S-1 Teknik Mesin dan Biosistem | S-1 Ilmu Kelautan	2	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Statistik | Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah	8.000.000	8.500.000
4	Analis Hukum Ahli Pertama	S-1 Hukum | S-1 Ilmu Hukum	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Tidak Dapat	Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan dan data dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ilmu Hukum	1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan dan data dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tidak Dapat	Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan dan data dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Tidak Dapat	Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan dan data dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ilmu Hukum | S-1 Hukum	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan dan data dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama, serta advokasi hukum	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
5	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Administrasi Negara | S-1 Administrasi Publik | S-1 Kebijakan Publik | S-1 Ilmu Pemerintahan	1	Inspektorat Jenderal | Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan dengan kompleksitas rendah	8.000.000	8.500.000
		S-1 Geografi	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Informasi	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan dengan kompleksitas rendah	8.000.000	8.500.000
		S-1 Perikanan | S-1 Kelautan | S-1 Ekonomi | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Ilmu Ekonomi | S-1 Ilmu Perikanan | S-1 Ekonomi Pembangunan | S-1 Antropologi | S-1 Teknik Industri | S-1 Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan | S-1 Ekonomi Sumber Daya Lingkungan | S-1 Hukum | S-1 Ilmu Hukum	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Kebijakan Strategis	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan dengan kompleksitas rendah	8.000.000	8.500.000
6	Analis Kerja Sama Ahli Pertama	S-1 Hubungan Internasional | S-1 Hukum | S-1 Hukum Hubungan Internasional | S-1 Hukum Laut Internasional | S-1 Kelautan | S-1 Kelautan Perikanan | S-1 Kelautan Sumber Daya Perairan | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Ilmu Komunikasi | S-1 Ilmu Kelautan dan Perikanan | D-IV Kelautan | D-IV Perikanan | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Hubungan Internasional	4	Sekretariat Jenderal | Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Tidak Dapat	Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam rangka mendukung analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama	8.000.000	8.500.000
		S-1 Hubungan Internasional | S-1 Hukum | S-1 Hukum Laut Internasional | S-1 Kelautan	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam rangka mendukung analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama	8.000.000	8.500.000
		S-1 Hubungan Internasional | S-1 Ilmu Hubungan Internasional | S-1 Kelautan | S-1 Kelautan Perikanan | S-1 Kelautan Sumber Daya Perairan | D-IV Kelautan	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tidak Dapat	Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam rangka mendukung analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama	8.000.000	8.500.000
		S-1 Manajemen	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Informasi	Tidak Dapat	Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam rangka mendukung analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama	8.000.000	8.500.000
7	Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	D-IV Perikanan | S-1 Ekonomi | D-IV Ekonomi | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-IV Pemasaran | D-IV Informasi | D-IV Komunikasi | D-IV Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | D-IV Statistik | D-IV Statistika | D-IV Logistik Bisnis | S-1 Sistem Informasi | S-1 Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Pemasaran | D-IV Manajemen Logistik | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Manajemen Logistik	6	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Prasarana dan Sarana	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Agrobisnis Perikanan | D-IV Pemasaran | D-IV Informasi | D-IV Komunikasi | D-IV Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | D-IV Statistik | D-IV Hubungan Internasional | D-IV Perikanan Budidaya | D-IV Logistik Bisnis | S-1 Sistem Informasi | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Pemasaran | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Manajemen Logistik | D-IV Perikanan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Manajemen | D-IV Manajemen | D-IV Ekonomi | S-1 Ekonomi	5	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ekonomi | D-IV Ekonomi | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Pemasaran | D-IV Informasi | D-IV Komunikasi | D-IV Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | D-IV Statistik | D-IV Perikanan Budidaya | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Manajemen | D-IV Teknologi Akuakultur | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Penyuluhan Perikanan | D-IV Ilmu Kelautan dan Perikanan | S-1 Agrobisnis Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | S-1 Sistem Informasi | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Pemasaran | S-1 Manajemen | S-1 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	8	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pemberdayaan Usaha	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ekonomi | D-IV Ekonomi | S-1 Hubungan Internasional | S-1 Agrobisnis Perikanan | D-IV Komunikasi | D-IV Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | D-IV Statistik | S-1 Sistem Informasi | S-1 Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Pemasaran | D-IV Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Manajemen | D-IV Manajemen	10	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Akses dan Promosi	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ekonomi | D-IV Ekonomi | S-1 Pemasaran | S-1 Teknologi Perikanan | S-1 Agrobisnis Perikanan | S-1 Sistem Informasi | S-1 Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Manajemen | D-IV Manajemen | D-IV Penyuluhan Perikanan | D-IV Ilmu Kelautan dan Perikanan	10	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pemasaran	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknologi Hasil Perairan	1	Sekretariat Jenderal | Biro Perencanaan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
8	Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil	D-III Perikanan | D-III Ekonomi | D-III Pengolahan Hasil Perikanan | D-III Permesinan Perikanan | D-III Pemasaran | D-III Manajemen | D-III Sosial Ekonomi Perikanan | D-III Komunikasi | D-III Statistik | D-III Perikanan Tangkap | D-III Akuntansi | D-III Ilmu Kelautan dan Perikanan | D-III Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	3	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri	6.400.000	6.900.000
9	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	D-IV Akuntansi | S-1 Ekonomi Akuntansi | D-IV Manajemen | S-1 Manajemen | S-1 Akuntansi	1	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Akses dan Promosi	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
		D-IV Keuangan | S-1 Administrasi Publik | S-1 Ekonomi | S-1 Keuangan	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Loka Produksi Garam Maros	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
		D-IV Keuangan | S-1 Administrasi Publik | S-1 Ekonomi | S-1 Keuangan | S-1 Akuntansi	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Besar Produksi Garam Kupang	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Produksi Garam Cirebon	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Konservasi Ekosistem	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
		D-IV Manajemen Keuangan Negara | D-IV Akuntansi | D-IV Ekonomi | S-1 Manajemen Keuangan Negara | S-1 Akuntansi | S-1 Ekonomi	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Besar Perikanan Budidaya Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	D-IV Manajemen Keuangan Negara | D-IV Akuntansi | D-IV Ekonomi | S-1 Manajemen Keuangan Negara | S-1 Akuntansi | S-1 Ekonomi	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sei Gelam	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Direktorat Ikan Air Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Direktorat Ikan Air Payau	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	D-IV Manajemen Keuangan Negara | D-IV Akuntansi | D-IV Ekonomi | S-1 Manajemen Keuangan Negara | S-1 Akuntansi | S-1 Ekonomi	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Direktorat Prasarana dan Sarana	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Akuntansi | S-1 Ekonomi	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ekonomi | S-1 Keuangan | S-1 Akuntansi | D-IV Ekonomi | D-IV Keuangan | D-IV Akuntansi	9	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ekonomi | S-1 Keuangan | S-1 Akuntansi | D-IV Keuangan | D-IV Akuntansi | D-IV Ekonomi	1	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ekonomi | S-1 Keuangan | S-1 Akuntansi | S-1 Manajemen | S-1 Administrasi Publik | D-IV Keuangan	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Loka Penataan Ruang Laut Sorong	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ekonomi | S-1 Keuangan | S-1 Akutansi | S-1 Manajemen | S-1 Administrasi Publik | D-IV Keuangan	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	S-1 Manajemen | S-1 Akuntansi | D-IV Manajemen Keuangan Negara	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Buleleng	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sorong	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	8.500.000
10	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	S-1 Manajemen | S-1 Manajemen Pendidikan | S-1 Teknologi Pendidikan | S-1 Perikanan | S-1 Kelautan	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Aparatur Denpasar	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan yang terdiri atas analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan kebutuhan pengembangan kompetensi, pengorganisasian program pengembangan kompetensi, dan pengendalian dan evaluasi program pengembangan kompetensi	8.000.000	8.500.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Aparatur Subang	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan yang terdiri atas analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan kebutuhan pengembangan kompetensi, pengorganisasian program pengembangan kompetensi, dan pengendalian dan evaluasi program pengembangan kompetensi	8.000.000	8.500.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan yang terdiri atas analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan kebutuhan pengembangan kompetensi, pengorganisasian program pengembangan kompetensi, dan pengendalian dan evaluasi program pengembangan kompetensi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Psikologi | S-1 Manajamen | S-1 Ilmu Ekonomi | S-1 Administrasi Publik | S-1 Ilmu Manajemen Sdm	1	Inspektorat Jenderal | Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan yang terdiri atas analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan kebutuhan pengembangan kompetensi, pengorganisasian program pengembangan kompetensi, dan pengendalian dan evaluasi program pengembangan kompetensi	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
11	Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	S-1 Ekonomi Sumber Daya | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Ilmu Lingkungan | S-1 Geografi | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam	5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Sumber Daya Kelautan	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Ilmu Lingkungan | S-1 Geografi | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Oceanografi | S-1 Teknik Atau Rekayasa Lingkungan | S-1 Arkeologi	21	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Besar Produksi Garam Kupang	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Sosiologi | S-1 Ekonomi Sumber Daya | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Ilmu Lingkungan | S-1 Geografi | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan	19	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000
			10	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000
			10	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000
			13	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Produksi Garam Cirebon	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000
			5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Jasa Bahari	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000
			5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Konservasi Ekosistem	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000
			5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000
			5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000
			9	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Loka Produksi Garam Maros	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	S-1 Teknik Atau Rekayasa Lingkungan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Arkeologi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Ilmu Lingkungan | S-1 Geografi	4	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	Tidak Dapat	Melaksanakan analisis dan pengumpulan data di bidang pengusahaan jasa kelautan	8.000.000	8.500.000
12	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur | S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia | D-IV Ilmu Administrasi Publik | S-1 Manajemen Kebijakan Publik | S-1 Ilmu Administrasi Publik | D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia | S-1 Manajemen Publik | S-1 Psikologi	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000
		D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur | S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia | D-IV Kebijakan Publik | D-IV Ilmu Pemerintahan | D-IV Ilmu Administrasi Publik | S-1 Manajemen Kebijakan Publik | S-1 Ilmu Administrasi Publik | D-IV Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Umum | S-1 Kebijakan Publik | D-IV Manajemen Informatika | D-IV Administrasi Pemerintahan | D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia | D-IV Teknik Informatika | S-1 Manajemen Publik | D-IV Manajemen Pemerintahan	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000
		D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik | D-IV Administrasi Publik | S-1 Studi Pemerintahan | S-1 Kebijakan Pemerintahan | S-1 Administrasi Negara | S-1 Ilmu Pemerintahan | S-1 Manajemen Pemerintahan | S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik | D-IV Ilmu Administrasi Negara | S-1 Administrasi Publik	1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Ilmu Administrasi Negara | S-1 Administrasi Publik | S-1 Kebijakan Publik | S-1 Manajemen Publik | S-1 Manajemen | S-1 Ilmu Pemerintahan | S-1 Sistem Informasi | S-1 Informatika	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Boalemo	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Buleleng	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ilmu Administrasi Negara | S-1 Ilmu Administrasi Publik | S-1 Kebijakan Publik | S-1 Manajemen Publik | S-1 Pengembangan Sumber Daya Manusia | S-1 Pemerintahan | S-1 Informatika | D-IV Ilmu Administrasi Negara | D-IV Pemerintahan | D-IV Informatika	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000
		S-1 Manajemen | S-1 Administrasi Publik | S-1 Administrasi Negara | S-1 Ilmu Pemerintahan | S-1 Sistem Informasi | S-1 Informatika	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sorong	Tidak Dapat	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
13	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Administrasi Perkantoran | D-IV Arsiparis | D-IV Arsip | D-IV Ilmu Kearsipan	1	Sekretariat Jenderal | Biro Perencanaan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Administrasi Perkantoran | D-IV Arsiparis | D-IV Arsip | D-IV Ilmu Kearsipan | S-1 Ilmu Perpustakaan | S-1 Perkantoran	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Kebijakan Strategis	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Kearsipan | D-IV Arsip | D-IV Ilmu Kearsipan | D-IV Kearsipan | S-1 Ilmu Kearsipan	1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Kearsipan | D-IV Kearsipan | S-1 Perkantoran	1	Inspektorat Jenderal | Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Kearsipan | S-1 Ilmu Perpustakaan | S-1 Administrasi Perkantoran | D-IV Administrasi Perkantoran | D-IV Kearsipan | S-1 Akuntansi | S-1 Sistem Informasi | S-1 Sastra Indonesia	4	Sekretariat Jenderal | Biro Umum	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	8.000.000	8.500.000
14	Arsiparis Terampil	D-III Administrasi Bisnis | D-III Administrasi Perkantoran | D-III Administrasi Publik | D-III Akuntansi | D-III Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan | D-III Kearsipan | D-III Manajemen | D-III Manajemen Sumber Daya Manusia | D-III Teknologi Komputer	31	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan peraturan yang berlaku	6.400.000	6.900.000
		D-III Administrasi Bisnis | D-III Administrasi Publik | D-III Manajemen Aset	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Statistik | Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan peraturan yang berlaku	6.400.000	6.900.000
		D-III Ilmu Kearsipan | D-III Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Kearsipan | D-III Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan | D-III Arsiparis | D-III Administrasi Kearsipan | D-III Arsip | D-III Kearsipan	1	Sekretariat Jenderal | Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan peraturan yang berlaku	6.400.000	6.900.000
		D-III Kearsipan	1	Sekretariat Jenderal | Biro Pengadaan Barang/Jasa	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan peraturan yang berlaku	6.400.000	6.900.000
15	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Psikologi | D-IV Psikologi	1	Sekretariat Jenderal | Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.	8.000.000	8.500.000
16	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	D-III Biologi | D-III Perikanan | D-III Ilmu Gizi | D-III Teknologi Pangan dan Gizi | D-III Teknologi Pangan | D-III Kimia | D-III Teknologi Hasil Perikanan | D-III Budi Daya Ikan | D-III Budidaya Perikanan | D-III Teknik Pengolahan Produk Perikanan | D-III Teknik Budidaya Perikanan | D-III Teknik Penanganan Patologi Perikanan | D-III Pengolahan Hasil Laut | D-III Perikanan Tangkap | D-III Teknik Penangkapan Ikan | D-III Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	44	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	6.400.000	6.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
17	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil	D-III Perikanan | D-III Teknologi Hasil Perikanan | D-III Ilmu Gizi | D-III Ilmu Pangan | D-III Ilmu Kelautan dan Perikanan | D-III Biologi | D-III Kimia	7	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	6.400.000	6.900.000
18	Asisten Pengawas Perikanan Pemula	SMK Nautika | SMK Budidaya Perikanan | SUPM Budidaya Perikanan | SUPM Budidaya Perairan | SUPM Pengolahan Hasil Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi hasil identifikasi pengawasan sumber daya perikanan yang meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	5.600.000	6.000.000
		SMK/SUPM Teknologi Penangkapan Ikan | SMK Budidaya Perikanan | SUPM Budidaya Perikanan | SUPM Budidaya Perairan | SUPM Pengolahan Hasil Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi hasil identifikasi pengawasan sumber daya perikanan yang meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	5.600.000	6.000.000
		SMK/SUPM Teknologi Penangkapan Ikan | SMK Nautika | SMK Budidaya Perikanan | SUPM Budidaya Perikanan | SUPM Budidaya Perairan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi hasil identifikasi pengawasan sumber daya perikanan yang meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	5.600.000	6.000.000
		SMK/SUPM Teknologi Penangkapan Ikan | SMK Nautika | SMK Budidaya Perikanan | SUPM Budidaya Perikanan | SUPM Budidaya Perairan | SUPM Pengolahan Hasil Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi hasil identifikasi pengawasan sumber daya perikanan yang meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	5.600.000	6.000.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi hasil identifikasi pengawasan sumber daya perikanan yang meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	5.600.000	6.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Asisten Pengawas Perikanan Pemula	SMK/SUPM Teknologi Penangkapan Ikan | SMK Nautika | SMK Budidaya Perikanan | SUPM Budidaya Perikanan | SUPM Budidaya Perairan | SUPM Pengolahan Hasil Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi hasil identifikasi pengawasan sumber daya perikanan yang meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	5.600.000	6.000.000
		SMK/SUPM Teknologi Penangkapan Ikan | SMK Nautika | SMK Budidaya Perikanan | SUPM Budidaya Perikanan | SUPM Pengolahan Hasil Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi hasil identifikasi pengawasan sumber daya perikanan yang meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	5.600.000	6.000.000
19	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	D-III Budidaya Perikanan | D-III Teknologi Penangkapan Ikan | D-III Mesin Perikanan | D-III Manajemen Sumber Daya Perairan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi identifikasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pencemaran perairan, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian dan perawatan armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	6.400.000	6.900.000
		D-III Perikanan | D-III Budidaya Perikanan | D-III Teknologi Budidaya Perikanan | D-III Teknologi Penangkapan Ikan | D-III Mesin dan Peralatan Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi identifikasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pencemaran perairan, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian dan perawatan armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	6.400.000	6.900.000
		D-III Perikanan | D-III Budidaya Perikanan | D-III Teknologi Budidaya Perikanan | D-III Teknologi Penangkapan Ikan | D-III Mesin dan Peralatan Perikanan | D-III Mesin Perikanan | D-III Manajemen Sumber Daya Perairan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi identifikasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pencemaran perairan, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian dan perawatan armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	6.400.000	6.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	D-III Perikanan | D-III Budidaya Perikanan | D-III Teknologi Budidaya Perikanan | D-III Teknologi Penangkapan Ikan | D-III Mesin dan Peralatan Perikanan | D-III Mesin Perikanan | D-III Manajemen Sumber Daya Perairan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi identifikasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pencemaran perairan, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian dan perawatan armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	6.400.000	6.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi identifikasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pencemaran perairan, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian dan perawatan armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	6.400.000	6.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi identifikasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pencemaran perairan, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian dan perawatan armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	6.400.000	6.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan data dan informasi identifikasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pencemaran perairan, pemeriksaan kapal perikanan yang di duga melakukan kegiatan IUU Fishing dan merusak, serta pengoperasian dan perawatan armada pengawasan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	6.400.000	6.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
20	Asisten Penyuluh Perikanan Terampil	D-III Teknik Budidaya Perikanan | D-III Teknik Pengolahan Produk Perikanan | D-III Agribisnis Perikanan | D-III Mekanisasi Perikanan | D-III Teknik Penanganan Patologi Perikanan | D-III Teknik Penangkapan Ikan | D-III Teknik Kelautan | D-III Budi Daya Ikan | D-III Pengolahan Hasil Laut | D-III Perikanan Tangkap | D-III Teknologi Kelautan | D-III Permesinan Kapal	5	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bantul	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan	6.400.000	6.900.000
			15	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bogor	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan	6.400.000	6.900.000
			10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Palembang	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan	6.400.000	6.900.000
			10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sorong	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan	6.400.000	6.900.000
			15	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Boalemo	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan	6.400.000	6.900.000
			5	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Buleleng	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan	6.400.000	6.900.000
			5	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Padang	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan	6.400.000	6.900.000
21	Auditor Ahli Pertama	S-1 Ilmu Hukum	5	Inspektorat Jenderal | Inspektorat V	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknik Sipil	6	Inspektorat Jenderal | Inspektorat II	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Auditor Ahli Pertama	S-1 Teknik Sipil | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Perikanan | S-1 Manajamen | S-1 Akuntansi | S-1 Teknologi Informatika | S-1 Hukum | D-IV Ilmu Kelautan dan Perikanan | D-IV Perikanan | D-IV Akuntansi | D-IV Manajamen | D-IV Teknologi Informasi	9	Inspektorat Jenderal | Inspektorat III	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknik Sipil | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Perikanan | S-1 Manajamen | S-1 Akuntansi | S-1 Teknologi Informatika | S-1 Ilmu Hukum | D-IV Ilmu Kelautan dan Perikanan | D-IV Perikanan | D-IV Akuntansi | D-IV Manajamen | D-IV Teknologi Informasi	9	Inspektorat Jenderal | Inspektorat I	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknik Sipil | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Perikanan | S-1 Manajemen | S-1 Akuntansi | S-1 Teknologi Informatika | S-1 Hukum | D-IV Ilmu Kelautan dan Perikanan | D-IV Perikanan | D-IV Akuntansi | D-IV Manajamen | D-IV Teknologi Informasi	8	Inspektorat Jenderal | Inspektorat IV	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi	8.000.000	8.500.000
22	Auditor Terampil	D-III Akuntansi | D-III Manajemen | D-III Perikanan	3	Inspektorat Jenderal | Inspektorat I	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi	6.400.000	6.900.000
			4	Inspektorat Jenderal | Inspektorat II	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi	6.400.000	6.900.000
			4	Inspektorat Jenderal | Inspektorat III	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi	6.400.000	6.900.000
			4	Inspektorat Jenderal | Inspektorat IV	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi	6.400.000	6.900.000
			4	Inspektorat Jenderal | Inspektorat V	Tidak Dapat	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi	6.400.000	6.900.000
23	Dokter Ahli Pertama	S-1 Profesi Dokter Umum	2	Sekretariat Jenderal | Biro Umum	Tidak Dapat	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	8.500.000	8.800.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
24	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	D-IV Teknologi Pangan dan Gizi | S-1 Ilmu Gizi | D-IV Ilmu Gizi | D-IV Perikanan | D-IV Biokimia | S-1 Teknologi Pangan dan Gizi | S-1 Kimia | S-1 Biokimia | S-1 Mikrobiologi | D-IV Bioteknologi | S-1 Teknologi Pangan | S-1 Bioteknologi | S-1 Biologi | D-IV Biologi | S-1 Perikanan | D-IV Kimia | D-IV Teknologi Pangan | D-IV Mikrobiologi | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Akuakultur | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-IV Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | S-1 Teknologi Hasil Perairan | D-IV Bioteknologi Perikanan | D-IV Teknologi Akuakultur | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | D-IV Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | D-IV Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap	104	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan	8.000.000	8.500.000
25	Instruktur Ahli Pertama	D-IV Akuakultur | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S-1 Agrobisnis Perikanan | D-IV Agrobisnis Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perairan | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Pengolahan Hasil Perikanan	5	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Medan	Tidak Dapat	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja	8.000.000	8.500.000
		D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknik Kelautan | D-IV Akuakultur | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S-1 Agrobisnis Perikanan | D-IV Agrobisnis Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perairan | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Pengolahan Hasil Perikanan	4	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja	8.000.000	8.500.000
		D-IV Teknologi Akuakultur	2	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Ambon	Tidak Dapat	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Instruktur Ahli Pertama	D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknik Kelautan | D-IV Akuakultur | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S-1 Agrobisnis Perikanan | D-IV Agrobisnis Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perairan | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap	5	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Buleleng	Tidak Dapat	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja	8.000.000	8.500.000
		D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap	3	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Maros	Tidak Dapat	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja	8.000.000	8.500.000
		S-1 Budidaya Perairan | S-1 Akuakultur | D-IV Budidaya Perikanan | D-IV Budidaya Perairan | D-IV Akuakultur	3	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi	Tidak Dapat	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknologi Hasil Perairan | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknik Mesin	3	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Depok	Tidak Dapat	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknologi Hasil Perairan | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap	3	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Subang	Tidak Dapat	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja	8.000.000	8.500.000
26	Juru Masak Kapal Kelas II	SUPM Perikanan | SLTA | SMU | SMK | SMK Pelayaran | SMK Tata Boga	6	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Juru Masak Kapal Kelas II	SUPM Perikanan | SLTA | SMU | SMK | SMK Pelayaran | SMK Tata Boga	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
27	Juru Masak Kapal Kelas III	SUPM Perikanan | SLTA | SMU | SMK | SMK Pelayaran | SMK Tata Boga	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Juru Masak Kapal Kelas III	SUPM Perikanan | SLTA | SMU | SMK | SMK Pelayaran | SMK Tata Boga	3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan	Tidak Dapat	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
28	Juru Minyak Kapal Kelas I	D-III Permesinan Perikanan | D-III Mekanisasi Perikanan | D-III Permesinan Kapal	46	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.000.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
29	Juru Minyak Kapal Kelas II	D-III Mekanisasi Perikanan | D-III Permesinan Kapal | D-III Permesinan Perikanan	6	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Juru Minyak Kapal Kelas II	D-III Mekanisasi Perikanan | D-III Permesinan Kapal | D-III Permesinan Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
30	Juru Minyak Kapal Kelas III	SMK/SUPM Permesinan Perikanan | SUPM Teknika Perikanan Laut | SUPM Teknik Perikanan Ikan	3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Juru Minyak Kapal Kelas III	SMK/SUPM Permesinan Perikanan | SUPM Teknika Perikanan Laut | SUPM Teknik Perikanan Ikan	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Juru Minyak Kapal Kelas III	SMK/SUPM Permesinan Perikanan | SUPM Teknika Perikanan Laut | SUPM Teknik Perikanan Ikan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan	Tidak Dapat	membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik, pompa pompa dan sistem dan bahan bakar dan pelumas Kapal Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
31	Juru Mudi Kapal Kelas II	D-IV Teknologi Penangkapan Ikan	5	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Juru Mudi Kapal Kelas II	D-IV Teknologi Penangkapan Ikan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
32	Juru Mudi Kapal Kelas III	D-IV Teknologi Penangkapan Ikan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Juru Mudi Kapal Kelas III	D-IV Teknologi Penangkapan Ikan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	Tidak Dapat	menyiapkan dan merawat kemudi kapal pengawas perikanan beserta sistemnya, serta mempertahankan kemudi kapal sesuai haluan pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan/atau ZEE perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	6.000.000	6.300.000
33	Kelasi Kapal Kelas I	D-III Teknologi Penangkapan Ikan | D-III Teknik Penangkapan Ikan | D-III Perikanan Tangkap	70	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
34	Kelasi Kapal Kelas II	D-III Teknologi Penangkapan Ikan | D-III Teknik Penangkapan Ikan | D-III Perikanan Tangkap	9	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Kelasi Kapal Kelas II	D-III Teknologi Penangkapan Ikan | D-III Teknik Penangkapan Ikan | D-III Perikanan Tangkap	3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Kelasi Kapal Kelas II	D-III Teknologi Penangkapan Ikan | D-III Teknik Penangkapan Ikan | D-III Perikanan Tangkap	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
35	Kelasi Kapal Kelas III	SUPM Penangkapan Ikan | SMK Teknologi Penangkapan Ikan | SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan | SMK/SUPM Teknologi Penangkapan Ikan | SUPM Nautika Perikanan Laut	3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			4	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			4	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Kelasi Kapal Kelas III	SUPM Penangkapan Ikan | SMK Teknologi Penangkapan Ikan | SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan | SMK/SUPM Teknologi Penangkapan Ikan | SUPM Nautika Perikanan Laut	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			6	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000
36	Kelasi Kapal Kelas IV	SUPM Penangkapan Ikan | SMK Teknologi Penangkapan Ikan | SUPM Nautika Kapal Penangkapan Ikan | SMK/SUPM Teknologi Penangkapan Ikan | SUPM Nautika Perikanan Laut	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
37	Masinis III Kapal Kelas II	D-IV Teknologi Mesin Perikanan | D-IV Mesin Perikanan | D-IV Permesinan Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	membantu Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal Pengawas Perikanan Kelas II dalam mengatur, mengawasi, merawat, operasional dan mengontrol Mesin Genset (A/E) dan seluruh sistemnya dalam pelaksanakan gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kapal pengawas perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dalam bidang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban awak Kapal Pengawas Perikanan Kelas II dengan panjang kapal di atas 40 meter dan beroperasi di perairan daerah samudera (open sea) dan ZEEI dengan Seaworthiness 6 meter dan kondisi wave height dengan kondisi seastage tingkat 5	6.000.000	6.300.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	membantu Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal Pengawas Perikanan Kelas II dalam mengatur, mengawasi, merawat, operasional dan mengontrol Mesin Genset (A/E) dan seluruh sistemnya dalam pelaksanakan gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kapal pengawas perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dalam bidang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban awak Kapal Pengawas Perikanan Kelas II dengan panjang kapal di atas 40 meter dan beroperasi di perairan daerah samudera (open sea) dan ZEEI dengan Seaworthiness 6 meter dan kondisi wave height dengan kondisi seastage tingkat 5	6.000.000	6.300.000
38	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	D-IV Ilmu Pangan | D-IV Teknologi Pangan | S-1 Ilmu Gizi | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Pangan | S-1 Ilmu Pangan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	4	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Prasarana dan Sarana	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	8.000.000	8.500.000
		D-IV Teknologi Pangan | D-IV Teknologi Akuakultur | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Ilmu Pangan | S-1 Pangan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Ilmu Pangan	2	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pemberdayaan Usaha	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Biologi | D-IV Biologi | S-1 Kimia | D-IV Kimia | S-1 Teknologi | D-IV Teknologi Pangan | D-IV Ilmu Gizi | S-1 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Pangan | D-IV Ilmu Pangan | S-1 Ilmu Pangan	7	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	S-1 Ilmu Gizi | S-1 Ilmu Pangan | D-IV Perikanan | S-1 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Ilmu Pangan | S-1 Pangan | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Ilmu Gizi	1	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Akses dan Promosi	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Perikanan dan Kelautan | D-IV Perikanan dan Kelautan | S-1 Kimia | D-IV Kimia | S-1 Teknologi Pangan | D-IV Teknologi Pangan | S-1 Ilmu Pangan | D-IV Ilmu Pangan | S-1 Ilmu Gizi | D-IV Ilmu Gizi | S-1 Gizi | D-IV Teknologi Akuakultur | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Pangan | S-1 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Ilmu Kelautan dan Perikanan | S-1 Perikanan Budidaya	3	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pemasaran	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknologi Pangan | S-1 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	10	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pengolahan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	8.000.000	8.500.000
39	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	D-IV Arkeologi | D-IV Antropologi | D-IV Ekonomi Sumber Daya | D-IV Geologi | D-IV Oseanografi | S-1 Arkeologi | S-1 Ekonomi Sumber Daya | S-1 Ekonomi Sumber Daya Kelautan | S-1 Geologi | S-1 Oseanografi | D-IV Ilmu Atau Sains Kelautan | S-1 Ilmu Atau Sains Kelautan | D-IV Biologi | D-IV Ilmu Atau Sains Perikanan | S-1 Ilmu Atau Sains Perikanan | D-IV Akuakultur | S-1 Akuakultur | S-1 Pengolahan Sumber Daya Perikanan | D-IV Perikanan Tangkap | S-1 Perikanan Tangkap | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Perencanaan Wilayah | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Permesinan Perikanan | D-IV Teknologi Akuakultur	3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
		D-IV Arkeologi | D-IV Antropologi | D-IV Ekonomi Sumber Daya | D-IV Geologi | D-IV Oseanografi | S-1 Arkeologi | S-1 Ekonomi Sumber Daya Kelautan | S-1 Geologi | S-1 Oseanografi | S-1 Ilmu Atau Sains Kelautan | D-IV Biologi | D-IV Ilmu Atau Sains Perikanan | D-IV Akuakultur | S-1 Akuakultur | S-1 Pengolahan Sumber Daya Perikanan | D-IV Perikanan Tangkap | S-1 Perikanan Tangkap | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Perencanaan Wilayah | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Permesinan Perikanan | D-IV Teknologi Akuakultur | S-1 Hukum	3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	D-IV Arkeologi | D-IV Antropologi | D-IV Ekonomi Sumber Daya | D-IV Geologi | D-IV Oseanografi | S-1 Arkeologi | S-1 Ekonomi Sumber Daya Kelautan | S-1 Geologi | S-1 Oseanografi | S-1 Ilmu Atau Sains Kelautan | D-IV Biologi | D-IV Ilmu Atau Sains Perikanan | D-IV Akuakultur | S-1 Akuakultur | S-1 Pengolahan Sumber Daya Perikanan | D-IV Perikanan Tangkap | S-1 Perikanan Tangkap | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Perencanaan Wilayah | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Permesinan Perikanan | D-IV Teknologi Akuakultur | S-1 Hukum	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
			1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	D-IV Arkeologi | D-IV Antropologi | D-IV Ekonomi Sumber Daya | D-IV Geologi | D-IV Oseanografi | S-1 Arkeologi | S-1 Ekonomi Sumber Daya Kelautan | S-1 Geologi | S-1 Oseanografi | S-1 Ilmu Atau Sains Kelautan | D-IV Biologi | D-IV Ilmu Atau Sains Perikanan | D-IV Akuakultur | S-1 Akuakultur | S-1 Pengolahan Sumber Daya Perikanan | D-IV Perikanan Tangkap | S-1 Perikanan Tangkap | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Perencanaan Wilayah | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Permesinan Perikanan | D-IV Teknologi Akuakultur | S-1 Hukum	3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
			2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	D-IV Arkeologi | D-IV Antropologi | D-IV Ekonomi Sumber Daya | D-IV Geologi | D-IV Oseanografi | S-1 Arkeologi | S-1 Ekonomi Sumber Daya Kelautan | S-1 Geologi | S-1 Oseanografi | S-1 Ilmu Atau Sains Kelautan | D-IV Biologi | D-IV Ilmu Atau Sains Perikanan | D-IV Akuakultur | S-1 Akuakultur | S-1 Pengolahan Sumber Daya Perikanan | D-IV Perikanan Tangkap | S-1 Perikanan Tangkap | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Perencanaan Wilayah | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Hukum	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
		D-IV Oseanografi | S-1 Ekonomi Sumber Daya Kelautan | S-1 Oseanografi | S-1 Ilmu Atau Sains Kelautan | D-IV Ilmu Atau Sains Perikanan | S-1 Pengolahan Sumber Daya Perikanan | D-IV Perikanan Tangkap | S-1 Perikanan Tangkap | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Hukum	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktorat Penanganan Pelanggaran	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
		D-IV Perencanaan Wilayah | S-1 Oseanografi | S-1 Ilmu Atau Sains Kelautan | D-IV Geologi | D-IV Oseanografi | S-1 Pengolahan Sumber Daya Perikanan | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan | S-1 Hukum | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan	3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
		D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan	116	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melakukan dukungan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan dan keselamatan pelayaran serta memastikan keselamatan operasional kapal perikanan di lingkungan pelabuhan perikanan	7.600.000	7.800.000
		S-1 Geografi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Planologi | S-1 Kelautan | S-1 Lingkungan | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Oceanografi | S-1 Biologi | S-1 Penginderaan Jauh | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | S-1 Perikanan	16	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Loka Penataan Ruang Laut Serang	Tidak Dapat	Melakukan analisa bahan di bidang perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	7.600.000	7.800.000
		S-1 Hukum | S-1 Teknik Informatika | S-1 Sistem Informasi | S-1 Teknik Sipil | S-1 Manajemen Logistik	1	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Prasarana dan Sarana	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis bahan dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perikanan budi daya	7.600.000	7.800.000
		S-1 Kelautan | S-1 Ekonomi Sumber Daya Alam | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Besar Produksi Garam Kupang	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	7.600.000	7.800.000
		S-1 Kelautan | S-1 Ekonomi Sumber Daya Kelautan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	7.600.000	7.800.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-1 Kelautan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Oceanografi | S-1 Penginderaan Jauh | S-1 Planologi | S-1 Lingkungan | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Geografi | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Loka Produksi Garam Maros	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	7.600.000	7.800.000
		S-1 Kelautan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Oceanografi | S-1 Penginderaan Jauh | S-1 Planologi | S-1 Lingkungan | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Geografi | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Sumber Daya Kelautan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	7.600.000	7.800.000
		S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | S-1 Lingkungan | S-1 Planologi | S-1 Perikanan | S-1 Geografi | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Oceanografi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | S-1 Penginderaan Jauh | S-1 Biologi	9	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Balai Penataan Ruang Laut Makassar	Tidak Dapat	Melakukan analisa bahan di bidang perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	7.600.000	7.800.000
			5	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Balai Penataan Ruang Laut Padang	Tidak Dapat	Melakukan analisa bahan di bidang perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	7.600.000	7.800.000
			19	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	Tidak Dapat	Melakukan analisa bahan di bidang perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	7.600.000	7.800.000
			6	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Dapat	Melakukan analisa bahan di bidang perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	7.600.000	7.800.000
			8	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melakukan analisa bahan di bidang perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	7.600.000	7.800.000
			19	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melakukan analisa bahan di bidang perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	7.600.000	7.800.000
			12	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	Tidak Dapat	Melakukan analisa bahan di bidang perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	7.600.000	7.800.000
			3	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Loka Penataan Ruang Laut Sorong	Tidak Dapat	Melakukan analisa bahan di bidang perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	7.600.000	7.800.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-1 Planologi | S-1 Kelautan | S-1 Penginderaan Jauh | S-1 Ilmu dan Teknologi Kelautan | S-1 Biologi | S-1 Oseanografi | S-1 Lingkungan | S-1 Geografi | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | S-1 Teknologi Industri Pangan | S-1 Teknik Industri | S-1 Ekonomi Sumber Daya Lingkungan | S-1 Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan | S-1 Teknik Lingkungan | S-1 Hukum | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Komunikasi | S-1 Hubungan Internasional	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Kebijakan Strategis	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	7.600.000	7.800.000
		S-1 Teknik Lingkungan | S-1 Planologi | S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Sistem Informasi Geografis | D-IV Teknik Sipil | S-1 Arsitektur | S-1 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Permesinan Perikanan | D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | S-1 Teknik Sipil	6	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis bahan dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perikanan budi daya	7.600.000	7.800.000
		S-1 Teknik Perkapalan | S-1 Teknik Sistem Perkapalan	6	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap | Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	7.600.000	7.800.000
		S-1 Teknik Sipil	3	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap | Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	7.600.000	7.800.000
			3	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap | Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	7.600.000	7.800.000
		S-1 Teknik Sipil | S-1 Teknik Lingkungan | S-1 Planologi | S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Sistem Informasi Geografis | D-IV Teknik Sipil | S-1 Arsitektur	16	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya A	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis bahan dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perikanan budi daya	7.600.000	7.800.000
		S-1 Teknik Sipil | S-1 Teknik Lingkungan | S-1 Planologi | S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Sistem Informasi Geografis | D-IV Teknik Sipil | S-1 Arsitektur | S-1 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Permesinan Perikanan | D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	51	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya B	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan analisis bahan dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perikanan budi daya	7.600.000	7.800.000
		S-1 Teknologi Informasi | D-IV Teknologi Informasi | S-1 Teknik Informatika | D-IV Teknik Informatika | S-1 Sistem Informasi | D-IV Sistem Informasi | S-1 Ilmu Komputer | D-IV Ilmu Komputer	5	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-1 Teknologi Pendidikan	2	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Aparatur Subang	Tidak Dapat	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian terkait penyuluhan dan pengembangan SDM menggunakan metode keterampilan tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	7.600.000	7.800.000
40	Penata Laksana Barang Terampil	D-III Akuntansi | D-III Manajemen | D-III Administrasi Negara | D-III Manajemen Aset | D-III Administrasi Bisnis	1	Inspektorat Jenderal | Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara diantaranya; perencanaan kebutuhan BMN untuk pengadaan dan pemeliharaan, penggunaan BMN, pemanfaatan BMN berupa sewa dan pinjam pakai; pengamanan dan pemeliharaan BMN, pemindahtanganan BMN berupa penjualan, tukar menukar, dan hibah, pemusnahan BMN, penghapusan BMN, penatausahaan BMN, berupa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan rekonsiliasi, pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.800.000	7.300.000
		D-III Ekonomi Akuntansi | D-III Ekonomi Manajemen | D-III Ekonomi Pembangunan | D-III Manajemen Aset | D-III Manajemen Keuangan | D-III Matematika	24	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara diantaranya; perencanaan kebutuhan BMN untuk pengadaan dan pemeliharaan, penggunaan BMN, pemanfaatan BMN berupa sewa dan pinjam pakai; pengamanan dan pemeliharaan BMN, pemindahtanganan BMN berupa penjualan, tukar menukar, dan hibah, pemusnahan BMN, penghapusan BMN, penatausahaan BMN, berupa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan rekonsiliasi, pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.800.000	7.300.000
		D-III Manajemen | D-III Manajemen Keuangan | D-III Manajemen Informatika | D-III Manajemen Administrasi | D-III Teknik Informatika | D-III Sistem Informasi Akuntansi | D-III Kebendaharaan Negara	1	Sekretariat Jenderal | Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara diantaranya; perencanaan kebutuhan BMN untuk pengadaan dan pemeliharaan, penggunaan BMN, pemanfaatan BMN berupa sewa dan pinjam pakai; pengamanan dan pemeliharaan BMN, pemindahtanganan BMN berupa penjualan, tukar menukar, dan hibah, pemusnahan BMN, penghapusan BMN, penatausahaan BMN, berupa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan rekonsiliasi, pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.800.000	7.300.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Laksana Barang Terampil	D-III Manajemen Aset | D-III Akuntansi	1	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara diantaranya; perencanaan kebutuhan BMN untuk pengadaan dan pemeliharaan, penggunaan BMN, pemanfaatan BMN berupa sewa dan pinjam pakai; pengamanan dan pemeliharaan BMN, pemindahtanganan BMN berupa penjualan, tukar menukar, dan hibah, pemusnahan BMN, penghapusan BMN, penatausahaan BMN, berupa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan rekonsiliasi, pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.800.000	7.300.000
41	Penata Perizinan Ahli Pertama	S-1 Ilmu Kelautan	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Statistik | Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Manajemen | S-1 Akuntansi | S-1 Ekonomi Syariah | S-1 Desain Komunikasi Visual | S-1 Geografi	5	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Informasi	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Manajemen | S-1 Bisnis dan Manajemen | S-1 Hukum | S-1 Lingkungan | S-1 Sains Informasi | S-1 Teknologi Informasi | D-IV Manajemen | D-IV Hukum | S-1 Ilmu Lingkungan | D-IV Ilmu Lingkungan | S-1 Kelautan | D-IV Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Ilmu Kelautan | S-1 Geografi | D-IV Geografi | S-1 Administrasi Negara | D-IV Administrasi Negara | S-1 Teknik Sipil | D-IV Teknik Sipil | S-1 Informatika | D-IV Informatika | D-IV Teknologi Informasi | S-1 Oseanografi | D-IV Oseanografi | S-1 Ilmu Hukum | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Teknik Lingkungan | -D-IV Teknik Lingkungan | S-1 Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geodesi | S-1 Teknik Geomatika | D-IV Teknik Geomatika | S-1 Arsitektur | D-IV Arsitektur | S-1 Teknik Bangunan | D-IV Teknik Bangunan | S-1 Planologi | D-IV Planologi | S-1 Teknik Planologi | D-IV Teknik Planologi | D-IV Teknik Kelautan	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Loka Penataan Ruang Laut Serang	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Perizinan Ahli Pertama	S-1 Manajemen | S-1 Bisnis dan Manajemen | S-1 Hukum | S-1 Lingkungan | S-1 Teknologi Informasi | D-IV Manajemen | D-IV Hukum | S-1 Ilmu Hukum | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Ilmu Lingkungan | D-IV Ilmu Lingkungan | S-1 Kelautan | D-IV Ilmu Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Kelautan | S-1 Geografi | D-IV Geografi | S-1 Administrasi Negara | D-IV Administrasi Negara | S-1 Teknik Sipil | D-IV Teknik Sipil | S-1 Informatika | D-IV Informatika | S-1 Teknik Informasi | D-IV Teknik Informatika | D-IV Teknologi Informasi | S-1 Oseanografi | D-IV Oseanografi | S-1 Teknik Lingkungan | -D-IV Teknik Lingkungan | S-1 Geodesi | D-IV Geodesi | S-1 Teknik Geomatika | D-IV Teknik Geomatika | S-1 Teknik Arsitektur | D-IV Teknik Arsitektur | S-1 Teknik Bangunan | D-IV Teknik Bangunan | S-1 Planologi | D-IV Planologi | S-1 Teknik Planologi | D-IV Teknik Planologi | D-IV Teknik Kelautan	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Manajemen | S-1 Bisnis dan Manajemen | S-1 Hukum | S-1 Lingkungan | S-1 Teknologi Informasi | S-1 Geografi | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Geografi | S-1 Administrasi Negara | S-1 Teknik Sipil | D-IV Manajamen | D-IV Hukum | S-1 Informatika | S-1 Teknik Informasi | D-IV Teknik Informasi dan Komunikasi | D-IV Informatika | D-IV Teknologi Informasi | S-1 Kelautan | D-IV Kelautan | S-1 Oseanografi | D-IV Oseanografi | S-1 Ilmu Hukum | D-IV Ilmu Hukum | D-IV Teknik Sipil | S-1 Teknik Lingkungan | S-1 Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geomatika | -D-IV Teknik Lingkungan | S-1 Teknik Geomatika | S-1 Teknik Arsitektur | D-IV Teknik Arsitektur | S-1 Teknik Bangunan | S-1 Teknik Planologi | D-IV Teknik Planologi | D-IV Teknik Kelautan	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Loka Penataan Ruang Laut Sorong	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Perizinan Ahli Pertama	S-1 Manajemen | S-1 Bisnis dan Manajemen | S-1 Hukum | S-1 Lingkungan | S-1 Teknologi Informasi | S-1 Geografi | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Geografi | S-1 Administrasi Negara | S-1 Teknik Sipil | D-IV Manajemen | D-IV Hukum | S-1 Informatika | S-1 Teknik Informasi | D-IV Teknik Informasi dan Komunikasi | D-IV Informatika | D-IV Teknologi Informasi | S-1 Kelautan | D-IV Kelautan | S-1 Oseanografi | D-IV Oseanografi | S-1 Ilmu Hukum | D-IV Ilmu Hukum | D-IV Teknik Sipil | S-1 Teknik Lingkungan | S-1 Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geomatika | D-IV Teknik Lingkungan | S-1 Teknik Geomatika | S-1 Teknik Arsitektur | D-IV Arsitektur | S-1 Teknik Bangunan | D-IV Teknik Bangunan | S-1 Planologi | D-IV Teknik Planologi | D-IV Teknik Kelautan	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Manajemen | S-1 Bisnis dan Manajemen | S-1 Hukum | S-1 Lingkungan | S-1 Teknologi Informasi | S-1 Geografi | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Geografi | S-1 Administrasi Negara | S-1 Teknik Sipil | D-IV Manajemen | D-IV Hukum | S-1 Informatika | S-1 Teknik Informasi | D-IV Teknik Informasi dan Komunikasi | D-IV Informatika | D-IV Teknologi Informasi | S-1 Kelautan | D-IV Kelautan | S-1 Oseanografi | D-IV Oseanografi | S-1 Ilmu Hukum | D-IV Ilmu Hukum | D-IV Teknik Sipil | S-1 Teknik Lingkungan | S-1 Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geomatika | D-IV Teknik Lingkungan | S-1 Teknik Geomatika | S-1 Teknik Arsitektur | D-IV Teknik Arsitektur | S-1 Teknik Bangunan | D-IV Teknik Bangunan | S-1 Teknik Planologi | D-IV Teknik Planologi | D-IV Teknik Kelautan	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Balai Penataan Ruang Laut Padang	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Perizinan Ahli Pertama	S-1 Manajemen | S-1 Bisnis dan Manajemen | S-1 Sosial | S-1 Hukum | S-1 Lingkungan | S-1 Teknologi Informasi | S-1 Geografi | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Geografi | S-1 Administrasi Negara | S-1 Teknik Sipil | D-IV Manajemen | D-IV Hukum | S-1 Informasi | S-1 Teknik Informasi | D-IV Teknik Informatika | D-IV Teknik Informasi dan Komunikasi | D-IV Teknologi Informasi | S-1 Kelautan | D-IV Kelautan | S-1 Oseanografi | D-IV Oseanografi | S-1 Ilmu Hukum | D-IV Ilmu Hukum | D-IV Teknik Sipil | S-1 Teknik Lingkungan | S-1 Teknik Geodesi | -D-IV Teknik Lingkungan | S-1 Geodesi | D-IV Geodesi | D-IV Teknik Geodesi | S-1 Geomatika | S-1 Teknik Arsitektur | D-IV Teknik Arsitektur | S-1 Teknik Bangunan | D-IV Teknik Bangunan | S-1 Planologi | D-IV Planologi | S-1 Teknik Planologi | D-IV Teknik Planologi | D-IV Teknik Kelautan	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Manajemen | S-1 Hukum | S-1 Teknologi Informasi | S-1 Bisnis dan Manajemen | S-1 Lingkungan | S-1 Geografi | D-IV Geografi | D-IV Manajemen | D-IV Hukum | D-IV Teknologi Informasi | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Ilmu Kelautan | S-1 Kelautan | D-IV Kelautan | S-1 Administrasi Negara | D-IV Administrasi Negara | S-1 Teknik Sipil | D-IV Teknik Sipil | S-1 Informatika | D-IV Informatika | S-1 Teknik Informasi | D-IV Teknik Informasi dan Komunikasi | S-1 Oseanografi | D-IV Oseanografi | S-1 Ilmu Hukum | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Teknik Lingkungan | -D-IV Teknik Lingkungan | S-1 Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geodesi | S-1 Teknik Geomatika | D-IV Teknik Geomatika | S-1 Teknik Arsitektur | D-IV Teknik Arsitektur | S-1 Teknik Bangunan | D-IV Teknik Bangunan | S-1 Planologi | D-IV Planologi | S-1 Teknik Planologi | D-IV Teknik Planologi | D-IV Teknik Kelautan	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Balai Penataan Ruang Laut Makassar	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Perizinan Ahli Pertama	S-1 Manajemen | S-1 Teknologi Informasi | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Teknologi Perikanan | D-IV Sosial Ekonomi | S-1 Administrasi Negara | D-IV Administrasi Negara | S-1 Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Kelautan | D-IV Ilmu Kelautan | S-1 Geografi | D-IV Geografi | D-IV Manajemen | S-1 Hukum | D-IV Hukum | S-1 Teknik Sipil | D-IV Teknik Sipil | S-1 Teknik Lingkungan | D-IV Teknik Lingkungan | S-1 Teknik Informasi | D-IV Teknik Informatika | S-1 Oseanografi | D-IV Oseanografi | S-1 Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geodesi | S-1 Geomatika | S-1 Teknik Geomatika | D-IV Teknik Geomatika | S-1 Arsitektur | D-IV Teknik Arsitektur | S-1 Teknik Bangunan | D-IV Teknik Bangunan | S-1 Teknik Planologi | D-IV Teknik Planologi	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Manajemen | S-1 Teknologi Informasi | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Teknologi Perikanan | D-IV Sosial Ekonomi | S-1 Administrasi Negara | D-IV Administrasi Negara | S-1 Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Kelautan | D-IV Ilmu Kelautan | S-1 Geografi | S-1 Teknik Informasi | S-1 Informatika | S-1 Oseanografi | S-1 Teknik Geodesi | D-IV Manajemen | D-IV Teknologi Informasi | S-1 Agribisnis Perikanan | D-IV Geografi | D-IV Oseanografi | D-IV Teknik Geodesi | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Agribisnis Perikanan | S-1 Bisnis dan Manajemen | D-IV Teknik Kelautan	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Perikanan | S-1 Manajemen | S-1 Hukum | S-1 Teknologi Informasi | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknik Atau Rekayasa Informatika | S-1 Teknologi Perikanan | D-IV Sosial Ekonomi | S-1 Bisnis dan Manajemen | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Administrasi Negara | D-IV Administrasi Negara | S-1 Ekonomi | S-1 Lingkungan | S-1 Penginderaan Jauh | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Oseanografi | S-1 Teknik Bangunan | S-1 Planologi | S-1 Teknik Planologi | D-IV Teknik Kelautan | S-1 Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geodesi | S-1 Kelautan | D-IV Kelautan	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Penata Perizinan Ahli Pertama	S-1 Perikanan | S-1 Manajemen | S-1 Teknologi Informasi | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknik Atau Rekayasa Informatika | S-1 Teknologi Perikanan | S-1 Bisnis dan Manajemen | S-1 Administrasi Negara | S-1 Kelautan | D-IV Manajamen | D-IV Teknologi Informasi | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Kelautan | D-IV Ilmu Kelautan | S-1 Agribisnis Perikanan | D-IV Agribisnis Perikanan | S-1 Geografi | D-IV Geografi | S-1 Teknik Informasi | D-IV Teknik Informatika | S-1 Oseanografi | D-IV Oseanografi | S-1 Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geodesi | D-IV Administrasi Negara | D-IV Teknik Kelautan	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Perikanan | S-1 Manajemen | S-1 Teknologi Informasi | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Teknologi Perikanan | S-1 Bisnis dan Manajemen | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Kelautan | S-1 Administrasi Negara | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknik Kelautan | S-1 Geografi | D-IV Geografi | S-1 Teknik Informasi | D-IV Teknik Informatika | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Kelautan | D-IV Oseanografi | S-1 Oseanografi | S-1 Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geodesi | S-1 Agribisnis Perikanan | D-IV Agribisnis Perikanan | D-IV Administrasi Negara	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Perikanan | S-1 Manajemen | S-1 Teknologi Perikanan | S-1 Bisnis dan Manajemen | D-IV Manajemen | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Agribisnis Perikanan | D-IV Agribisnis Perikanan | S-1 Administrasi Negara | D-IV Administrasi Negara | S-1 Kelautan | D-IV Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Ilmu Kelautan | S-1 Geografi | D-IV Geografi | S-1 Teknik Informasi | D-IV Teknik Informatika | S-1 Oseanografi | D-IV Oseanografi | S-1 Teknik Geodesi | D-IV Teknik Geodesi | D-IV Teknik Kelautan	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Teknologi Perikanan | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Perikanan	1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
42	Penerjemah Bahasa Inggris Ahli Pertama	S-1 Sastra Inggris	1	Sekretariat Jenderal | Biro Perencanaan	Tidak Dapat	Melaksanakan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan paraprofesional, penyusunan naskah bahan penerjemahan, dan pengembangan teknis di bidang penerjemahan bahasa inggris	8.000.000	8.500.000
			1	Sekretariat Jenderal | Biro Umum	Tidak Dapat	Melaksanakan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan paraprofesional, penyusunan naskah bahan penerjemahan, dan pengembangan teknis di bidang penerjemahan bahasa inggris	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
43	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	S-1 Akuakultur | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Permesinan Perikanan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Sumber Daya Akuatik | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | S-1 Sumber Daya Akuatik | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Kelautan | S-1 Manajemen | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Akuakultur | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Perikanan | D-IV Ilmu Lingkungan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Ilmu Lingkungan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Akuakultur | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Permesinan Perikanan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Sumber Daya Akuatik | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | S-1 Sumber Daya Akuatik | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Kelautan | S-1 Manajemen | D-IV Ilmu Kelautan | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Perikanan | D-IV Ilmu Lingkungan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Ilmu Lingkungan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	5	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Akuakultur | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Permesinan Perikanan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | S-1 Sumber Daya Akuatik | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Kelautan | S-1 Manajemen | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Akuakultur | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Perikanan | D-IV Ilmu Lingkungan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Ilmu Lingkungan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Permesinan Perikanan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Sumber Daya Akuatik | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | S-1 Sumber Daya Akuatik | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Kelautan | S-1 Manajemen | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Akuakultur | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Perikanan | D-IV Ilmu Lingkungan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	4	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknologi Hasil Perairan | S-1 Akuakultur | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Sumber Daya Akuatik | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Kelautan | S-1 Manajemen | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Perikanan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Ilmu Lingkungan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	3	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknologi Hasil Perairan | S-1 Akuakultur | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Permesinan Perikanan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Sumber Daya Akuatik | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | S-1 Sumber Daya Akuatik | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Manajemen | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Akuakultur | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Perikanan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Ilmu Lingkungan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Hutan	5	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	S-1 Teknologi Hasil Perairan | S-1 Akuakultur | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Permesinan Perikanan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Sumber Daya Akuatik | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | S-1 Sumber Daya Akuatik | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Kelautan | S-1 Manajemen | D-IV Akuakultur | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Perikanan | D-IV Ilmu Lingkungan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Ilmu Lingkungan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	4	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknologi Hasil Perairan | S-1 Akuakultur | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Permesinan Perikanan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Sumber Daya Akuatik | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Kelautan | S-1 Manajemen | D-IV Akuakultur | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Ilmu Lingkungan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	4	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknologi Hasil Perairan | S-1 Akuakultur | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Permesinan Perikanan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Sumber Daya Akuatik | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | S-1 Sumber Daya Akuatik | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Kelautan | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Perikanan | D-IV Ilmu Lingkungan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	4	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	S-1 Teknologi Hasil Perairan | S-1 Akuakultur | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Sumber Daya Akuatik | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Manajemen | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Akuakultur | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Perikanan | D-IV Ilmu Lingkungan | D-IV Permesinan Perikanan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	2	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknologi Hasil Perairan | S-1 Akuakultur | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | S-1 Permesinan Perikanan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Sumber Daya Akuatik | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | S-1 Sumber Daya Akuatik | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Kelautan | S-1 Manajemen | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Akuakultur | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Perikanan | D-IV Ilmu Lingkungan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Ilmu Lingkungan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	4	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknologi Hasil Perairan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Permesinan Perikanan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Sumber Daya Akuatik | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Kelautan | S-1 Manajemen | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Akuakultur | S-1 Ilmu Hukum | D-IV Ilmu Lingkungan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	5	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	Tidak Dapat	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
44	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	S-1 Geografi	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Informasi	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
		S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Akuakultur | S-1 Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam | S-1 Geografi | S-1 Lingkungan | S-1 Geologi | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi	3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
		S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen | S-1 Akuakultur | S-1 Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi	3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Sumber Daya Kelautan	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
		S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen | S-1 Akuakultur | S-1 Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam | S-1 Geografi | S-1 Antropologi | S-1 Lingkungan | S-1 Geologi | S-1 Pendidikan Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi	5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Produksi Garam Cirebon	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen | S-1 Akuakultur | S-1 Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam | S-1 Geografi | S-1 Antropologi | S-1 Lingkungan | S-1 Geologi | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi	2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Jasa Bahari	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
			3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Konservasi Ekosistem	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
			3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Loka Produksi Garam Maros	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
		S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen | S-1 Akuakultur | S-1 Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam | S-1 Geografi | S-1 Lingkungan | S-1 Geologi | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi	3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen | S-1 Akuakultur | S-1 Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam | S-1 Geografi | S-1 Lingkungan | S-1 Geologi | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi	4	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
		S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen | S-1 Akuakultur | S-1 Teknologi dan Manajemen Akuakultur | S-1 Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam | S-1 Geografi | S-1 Antropologi | S-1 Lingkungan | S-1 Geologi | S-1 Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi | S-1 Ilmu Kelautan	6	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
		S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | S-1 Akuakultur | S-1 Konservasi Biologi | D-IV Manajemen | S-1 Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam | S-1 Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S-1 Biologi | S-1 Geografi | S-1 Antropologi | S-1 Lingkungan | S-1 Arkeologi | S-1 Geologi | S-1 Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan	3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
		S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | D-IV Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 Kelautan | D-IV Ilmu Atau Sains Kelautan | S-1 Teknik | S-1 Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S-1 Lingkungan | S-1 Biologi | S-1 Geografi | S-1 Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan	6	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Balai Penataan Ruang Laut Makassar	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | D-IV Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 Kelautan | D-IV Ilmu Atau Sains Kelautan | S-1 Teknik | S-1 Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S-1 Lingkungan | S-1 Biologi | S-1 Geografi | S-1 Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan	4	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Balai Penataan Ruang Laut Padang	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
			4	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
			6	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | D-IV Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 Kelautan | D-IV Ilmu Atau Sains Kelautan | S-1 Teknik | S-1 Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S-1 Lingkungan | S-1 Biologi | S-1 Geografi | S-1 Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan	2	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
			3	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
			5	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Loka Penataan Ruang Laut Sorong	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
		S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | S-1 Konservasi Biologi | D-IV Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | D-IV Ilmu Atau Sains Kelautan | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam | S-1 Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S-1 Biologi | S-1 Geografi | S-1 Geologi | S-1 Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan	6	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Besar Produksi Garam Kupang	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | S-1 Konservasi Sumber Daya Alam | S-1 Geografi | S-1 Lingkungan | S-1 Geologi | S-1 Pendidikan Sosial Ekonomi Perikanan | S-1 Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi	4	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
		S-1 Oceanografi | S-1 Oseanografi	1	Sekretariat Jenderal | Biro Perencanaan	Tidak Dapat	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
45	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	S-1 Kedokteran Hewan | S-1 Farmasi | D-IV Farmasi	8	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	8.000.000	8.500.000
		S-1 Kedokteran Hewan | S-1 Lingkungan | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Budi Daya Perairan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | S-1 Biologi | D-IV Teknologi Akuakultur | S-1 Akuakultur | S-1 Biokimia | D-IV Biologi | S-1 Budi Daya Perikanan | D-IV Farmasi | D-IV Analis Kimia | S-1 Kimia | S-1 Farmasi	2	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	8.000.000	8.500.000
		S-1 Kedokteran Hewan | S-1 Lingkungan | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Budidaya Perairan | D-IV Farmasi | D-IV Analis Kimia | S-1 Kimia | S-1 Farmasi	2	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	8.000.000	8.500.000
		S-1 Kedokteran Hewan | S-1 Lingkungan | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | S-1 Biologi | D-IV Teknologi Akuakultur | S-1 Akuakultur | D-IV Biologi | S-1 Budidaya Perikanan | D-IV Farmasi | D-IV Analis Kimia | S-1 Kimia | S-1 Farmasi | S-1 Biokimia	2	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sei Gelam	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	8.000.000	8.500.000
		S-1 Kedokteran Hewan | S-1 Lingkungan | S-1 Perikanan Budidaya | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | S-1 Biologi | D-IV Teknologi Akuakultur | S-1 Akuakultur | S-1 Biokimia | D-IV Biologi | S-1 Budidaya Perikanan | D-IV Farmasi | D-IV Analis Kimia | S-1 Kimia | S-1 Farmasi	39	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya A	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
46	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 Teknik Sipil | S-1 Teknik Perkapalan | S-1 Teknik Kelautan | D-IV Akuakultur | S-1 Akuakultur | S-1 Akuntansi	6	Sekretariat Jenderal | Biro Pengadaan Barang/Jasa	Tidak Dapat	Melaksanakan identifikasi, inventarisasi/pengumpulan, verifikasi, pengolahan, penyajian data, dan pengelolaan di bidang pengadaan barang/jasa	8.000.000	8.500.000
47	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perairan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Ilmu dan Teknologi Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap	12	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.	8.000.000	8.500.000
		S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perairan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Ilmu dan Teknologi Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | D-IV Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Permesinan Perikanan	3	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap | Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.	8.000.000	8.500.000
		S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perairan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Ilmu dan Teknologi Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan	14	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.	8.000.000	8.500.000
		S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perairan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Ilmu dan Teknologi Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Permesinan Perikanan	25	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.	8.000.000	8.500.000
		S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perairan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Ilmu dan Teknologi Kelautan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Permesinan Perikanan	6	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.	8.000.000	8.500.000
		S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perairan | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Permesinan Perikanan | S-1 Ilmu dan Teknologi Kelautan	3	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap	1	Sekretariat Jenderal | Biro Perencanaan	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.	8.000.000	8.500.000
48	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	D-IV Penyuluhan Perikanan | D-IV Permesinan Perikanan | D-IV Teknologi Akuakultur | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan | D-IV Teknologi Hasil Perikanan	15	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bantul	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan	8.000.000	8.500.000
			30	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bogor	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan	8.000.000	8.500.000
			38	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Palembang	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan	8.000.000	8.500.000
			20	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sorong	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan	8.000.000	8.500.000
			25	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Boalemo	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan	8.000.000	8.500.000
			15	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Buleleng	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan	8.000.000	8.500.000
			15	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Padang	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan	8.000.000	8.500.000
	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	D-IV Penyuluhan Perikanan | D-IV Permesinan Perikanan | D-IV Teknologi Akuakultur | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan | D-IV Teknologi Hasil Perikanan	30	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	Melaksanakan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
49	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	S-1 Hukum | S-1 Ilmu Hukum	1	Sekretariat Jenderal | Biro Pengadaan Barang/Jasa	Tidak Dapat	Mengumpulkan data dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya	8.000.000	8.500.000
			1	Sekretariat Jenderal | Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Tidak Dapat	Mengumpulkan data dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya	8.000.000	8.500.000
			1	Sekretariat Jenderal | Biro Umum	Tidak Dapat	Mengumpulkan data dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ilmu Hukum	1	Inspektorat Jenderal | Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tidak Dapat	Mengumpulkan data dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ilmu Hukum | S-1 Hukum	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Tidak Dapat	Mengumpulkan data dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya	8.000.000	8.500.000
			11	Sekretariat Jenderal | Biro Hukum	Tidak Dapat	Mengumpulkan data dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya	8.000.000	8.500.000
50	Perencana Ahli Pertama	D-IV Administrasi Publik | D-IV IImu Administrasi Publik | S-1 Manajemen | D-IV Manajamen | S-1 Administrasi Kebijakan Publik | S-1 Administrasi dan Manajemen Kepegawaian | S-1 Administrasi Kepegawaian	1	Sekretariat Jenderal | Biro Hukum	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
		D-IV Budidaya Perairan | D-IV Ekonomi Pembangunan | D-IV Perencanaan Wilayah dan Kota | D-IV Teknik Sipil | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Ekonomi Pembangunan | S-1 Perencanaan Wilayah Kota | S-1 Teknik Sipil | S-1 Teknologi Manajemen Aquakultur	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Administrasi Kebijakan Publik | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Manajemen | S-1 Ilmu Ekonomi | S-1 Ekonomi Pembangunan | S-1 Ilmu Administrasi Negara | D-IV Administrasi Publik | D-IV IImu Administrasi Publik | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-IV Ilmu Administrasi Negara | D-IV Manajemen | D-IV Ilmu Ekonomi | D-IV Ekonomi Pembangunan	1	Sekretariat Jenderal | Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
	Perencana Ahli Pertama	S-1 Ekonomi | S-1 Ekonomi Pembangunan | S-1 Manajemen | S-1 Administrasi Publik | S-1 Administrasi Negara | S-1 Kebijakan Publik | S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik | S-1 Ilmu Pemerintahan | S-1 Statistika | S-1 Akuntansi | D-IV Administrasi Publik | D-IV Administrasi Negara | D-IV Kebijakan Publik | D-IV Manajemen Dan Kebijakan Publik | D-IV Statistika | D-IV Akuntansi	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ekonomi | S-1 Perikanan | D-IV Perikanan | S-1 Akuntansi	1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Hukum | S-1 Kelautan | S-1 Oseanografi | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Ilmu Ekonomi | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Planologi | S-1 Perikanan | S-1 Ilmu Politik | S-1 Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 Ekonomi	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Kebijakan Strategis	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ilmu Perairan | S-1 Oceanografi | S-1 Planologi | D-IV Teknologi Kelautan	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Produksi Garam Cirebon	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
	Perencana Ahli Pertama	S-1 Ilmu Perairan | S-1 Oceanografi | S-1 Planologi | D-IV Teknologi Kelautan	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Loka Produksi Garam Maros	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ilmu Perairan | S-1 Oceanografi | S-1 Planologi | S-1 Administrasi Publik | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Ilmu Pemerintahan | S-1 Sosiologi	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
		S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | S-1 Ilmu Kelautan | S-1 Teknik Geodesi dan Geomatika	2	Sekretariat Jenderal | Biro Perencanaan	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 Ilmu Ekonomi | S-1 Administrasi Publik | S-1 Kebijakan Publik | S-1 Manajemen | S-1 Administrasi Negara	1	Inspektorat Jenderal | Inspektorat II	Tidak Dapat	Menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan	8.000.000	8.500.000
51	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D-IV Jurnalistik | D-IV Ilmu Komunikasi | D-IV Komunikasi Hubungan Masyarakat | D-IV Penyiaran | D-IV Hubungan Masyarakat | D-IV Design Komunikasi Visual | D-IV Animasi | D-IV Hubungan Internasional | S-1 Ilmu Komunikasi | S-1 Ilmu Hubungan Masyarakat | S-1 Design Komunikasi Visual | S-1 Hubungan Masyarakat | S-1 Ilmu Jurnalistik | S-1 Jurnalistik | S-1 Komunikasi Penyiaran | S-1 Penyiaran | S-1 Hubungan Internasional | S-1 Ilmu Hukum | D-IV Desain Media | D-IV Desain Grafis | D-IV Manajemen Produksi Berita | D-IV Manajemen Produksi Siaran | S-1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | D-IV Manajemen Informasi Komunikasi | D-IV Komunikasi Massa	1	Sekretariat Jenderal | Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan naskah, konten, dan data di bidang informasi dan kehumasan	8.000.000	8.500.000
		D-IV Penyiaran | D-IV Ilmu Komunikasi | D-IV Komunikasi Hubungan Masyarakat | D-IV Jurnalistik | D-IV Hubungan Internasional | S-1 Ilmu Komunikasi | S-1 Ilmu Hubungan Masyarakat | S-1 Desain Komunikasi Visual | S-1 Penyiaran | S-1 Hubungan Internasional	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan naskah, konten, dan data di bidang informasi dan kehumasan	8.000.000	8.500.000
		D-IV Penyiaran | D-IV Ilmu Komunikasi | S-1 Ilmu Komunikasi | S-1 Desain Komunikasi Visual | S-1 Penyiaran | S-1 Ilmu Komunikasi/Hubungan Masyarakat | S-1 Hubungan Masyarakat | S-1 Jurnalistik | S-1 Komunikasi Penyiaran | D-IV Jurnalistik | D-IV Desain Komunikasi Visual | D-IV Hubungan Masyarakat	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan naskah, konten, dan data di bidang informasi dan kehumasan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Hubungan Masyarakat | D-IV Komunikasi Massa | D-IV Hubungan Internasional | S-1 Desain Komunikasi Visual | D-IV Hubungan Masyarakat | D-IV Desain Komunikasi Visual | S-1 Ilmu Hubungan Masyarakat | S-1 Ilmu Komunikasi | D-IV Desain Grafis | D-IV Desain Media | D-IV Ilmu Komunikasi | D-IV Komunikasi Hubungan Masyarakat	1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan naskah, konten, dan data di bidang informasi dan kehumasan	8.000.000	8.500.000
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 Ilmu Hubungan Masyarakat | D-IV Desain Media | D-IV Desain Grafis | S-1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | D-IV Manajemen Informasi Komunikasi | S-1 Hubungan Masyarakat | S-1 Ilmu Jurnalistik | S-1 Desain Komunikasi Visual | D-IV Jurnalistik | S-1 Hubungan Internasional | S-1 Jurnalistik | S-1 Ilmu Komunikasi | D-IV Hubungan Masyarakat	1	Sekretariat Jenderal | Biro Hukum	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan naskah, konten, dan data di bidang informasi dan kehumasan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
		S-1 Ilmu Hubungan Masyarakat | S-1 Komunikasi Jurnalistik | S-1 Sistem Informasi | S-1 Desain Grafis | S-1 Animasi | S-1 Ilmu Jurnalistik | S-1 Desain Komunikasi Visual | S-1 Komunikasi Penyiaran | S-1 Penyiaran | S-1 Ilmu Komunikasi | D-IV Penyiaran | D-IV Manajemen Teknik Studio Produksi | D-IV Manajemen Produksi Pemberitaan | D-IV Broadcasting | D-IV Sistem Informasi | D-IV Desain Media | D-IV Desain Grafis | D-IV Manajemen Produksi Berita | D-IV Manajemen Produksi Siaran | D-IV Manajemen Informasi Komunikasi | D-IV Animasi | D-IV Ilmu Komunikasi | D-IV Jurnalistik | D-IV Desain Komunikasi Visual | D-IV Komunikasi Hubungan Masyarakat | D-IV Hubungan Masyarakat	11	Sekretariat Jenderal | Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan naskah, konten, dan data di bidang informasi dan kehumasan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ilmu Komunikasi | S-1 Desain Komunikasi Visual | S-1 Teknik Informatika | S-1 Sistem Informasi | S-1 Jurnalistik	2	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan naskah, konten, dan data di bidang informasi dan kehumasan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ilmu Komunikasi | S-1 Hubungan Internasional | S-1 Desain Komunikasi Visual | D-IV Manajemen Komunikasi | D-IV Desain Komunikasi Visual | D-IV Broadcasting | D-IV Teknik Multimedia Digital	1	Inspektorat Jenderal | Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan naskah, konten, dan data di bidang informasi dan kehumasan	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ilmu Komunikasi | S-1 Hubungan Masyarakat | S-1 Jurnalistik | S-1 Manajemen Komunikasi | S-1 Komunikasi | D-IV Broadcasting | S-1 Hubungan Internasional | S-1 Periklanan | S-1 Komunikasi Massa | S-1 Penyiaran | S-1 Politik dan Pemerintahan | S-1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | S-1 Desain Komunikasi Visual | D-IV Komunikasi Massa | D-IV Komunikasi	1	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Akses dan Promosi	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan naskah, konten, dan data di bidang informasi dan kehumasan	8.000.000	8.500.000
52	Pranata Keuangan APBN Terampil	D-III Akuntansi	1	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktorat Akses dan Promosi	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, penyiapan analisis laporan keuangan instansi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	6.800.000	7.300.000
	Pranata Keuangan APBN Terampil	D-III Akuntansi	1	Sekretariat Jenderal | Biro Pengadaan Barang/Jasa	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, penyiapan analisis laporan keuangan instansi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	6.800.000	7.300.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
		D-III Ekonomi | D-III Keuangan | D-III Akuntansi | D-III Manajemen | D-III Manajemen Administrasi Keuangan	1	Inspektorat Jenderal | Inspektorat IV	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, penyiapan analisis laporan keuangan instansi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	6.800.000	7.300.000
			1	Inspektorat Jenderal | Inspektorat V	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, penyiapan analisis laporan keuangan instansi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	6.800.000	7.300.000
		D-III Kebendaharaan Negara | D-III Akuntansi | D-III Ekonomi | D-III Manajemen | D-III Keuangan | D-III Administrasi	1	Sekretariat Jenderal | Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, penyiapan analisis laporan keuangan instansi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	6.800.000	7.300.000
		D-III Manajemen | D-III Keuangan | D-III Kebendaharaan Negara | D-III Akuntansi | D-III Ekonomi | D-III Administrasi	1	Sekretariat Jenderal | Biro Perencanaan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, penyiapan analisis laporan keuangan instansi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	6.800.000	7.300.000
		D-III Manajemen Perusahaan | D-III Ekonomi | D-III Administrasi Keuangan | D-III Ekonomi Akuntansi | D-III Manajemen | D-III Keuangan dan Perbankan | D-III Akuntansi | D-III Manajemen Keuangan | D-III Komputer Akuntansi	19	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, penyiapan analisis laporan keuangan instansi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	6.800.000	7.300.000
53	Pranata Komputer Ahli Pertama	D-IV Manajemen Komputer | S-1 Desain Grafis | S-1 Ilmu Informatika | S-1 Teknologi Informasi | S-1 Teknik Elektro (Informatika dan Komputer) | S-1 Manajemen Komputer | D-IV Teknologi Informasi | D-IV Ilmu Informatika | S-1 Komputer | D-IV Ilmu Komputer | S-1 Informatika | S-1 Ilmu Komputer | D-IV Sistem Komputer | S-1 Teknik Informatika | D-IV Teknik Informatika | S-1 Sistem Komputer	1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
		D-IV Sistem Informasi | D-IV Kecerdasan Buatan | D-IV Teknik Informatika | S-1 Ilmu Komputer | S-1 Sistem Informasi | S-1 Informatika dan Jaringan Komputer | S-1 Teknik Informatika | D-IV Keamanan Sistem Informasi | S-1 Informatika | D-IV Rekayasa Keamanan Siber | D-IV Informatika dan Komputer | S-1 Komputer dan Sistem Informatika	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Balai Besar Produksi Garam Kupang	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
		D-IV Sistem Informasi | D-IV Teknik Informatika | S-1 Ilmu Komputer | D-IV Ilmu Komputer | S-1 Sistem Informasi | S-1 Informatika dan Jaringan Komputer | S-1 Teknik Informatika | D-IV Keamanan Sistem Informasi | S-1 Informatika | D-IV Rekayasa Keamanan Siber | D-IV Informatika dan Komputer | S-1 Komputer dan Sistem Informatika | S-1 Desain Komunikasi Visual | S-1 Desain Grafis	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Kebijakan Strategis	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
		S-1 Ilmu Komputer | S-1 Teknik Informatika | S-1 Informatika | S-1 Sistem Informasi | S-1 Teknologi Informasi | D-IV Ilmu Komputer | D-IV Teknik Informatika | D-IV Informatika | D-IV Sistem Informasi	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Balai Penataan Ruang Laut Makassar	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Balai Penataan Ruang Laut Padang	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Sistem Informasi | S-1 Teknik Informatika | S-1 Sistem Komputer | S-1 Desain Komunikasi Visual	4	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Informasi	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknik Informatika	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Statistik | Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknik Informatika | S-1 Ilmu Komputer | D-IV Teknik Informatika | D-IV Ilmu Komputer	1	Inspektorat Jenderal | Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
		S-1 Teknik Informatika | S-1 Sistem Informasi | D-IV Teknik Informatika | D-IV Sistem Informasi | S-1 Ilmu Komputer	1	Sekretariat Jenderal | Biro Umum	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknik Informatika | S-1 Sistem Informasi | S-1 Sains Data | S-1 Ilmu Komputer | S-1 Teknik Komputer | S-1 Rekayasa Perangkat Lunak | S-1 Sistem Komputer | S-1 Teknologi Informasi | S-1 Kecerdasan Buatan | S-1 Sistem dan Teknologi Informasi | D-IV Ilmu Komputer | D-IV Teknik Informatika | D-IV Teknologi Rekayasa Komputer	1	Sekretariat Jenderal | Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
		S-1 Teknik Informatika | S-1 Sistem Komputer | S-1 Teknik Komputer | S-1 Sistem Informasi | S-1 Teknologi Informasi	1	Sekretariat Jenderal | Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000
54	Pranata Komputer Terampil	D-III Ilmu Komputer | D-III Komputer | D-III Informatika dan Jaringan Komputer | D-III Elektronika dan Teknologi Komputer | D-III Jaringan Komputer | D-III Teknik Komputer	1	Sekretariat Jenderal | Biro Umum	Tidak Dapat	Melakukan penggandaan data, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network) dan permasalahan perangkat teknologi informasi end user, pencatatan infrastruktur teknologi informasi, pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user, perekaman data dengan pemindaian, dengan validasi, dan tanpa validasi,validasi hasil perekaman data, query sederhana, konversi data, kompilasi data pengolahan, perekaman data spasial dan uji coba program multimedia interaktif	6.400.000	6.900.000
	Pranata Komputer Terampil	D-III Teknik Informatika | D-III Manajemen Informatika | D-III Sistem Informasi	1	Sekretariat Jenderal | Biro Pengadaan Barang/Jasa	Tidak Dapat	Melakukan penggandaan data, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network) dan permasalahan perangkat teknologi informasi end user, pencatatan infrastruktur teknologi informasi, pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user, perekaman data dengan pemindaian, dengan validasi, dan tanpa validasi,validasi hasil perekaman data, query sederhana, konversi data, kompilasi data pengolahan, perekaman data spasial dan uji coba program multimedia interaktif	6.400.000	6.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
		D-III Teknik Informatika | D-III Rekayasa Perangkat Lunak	1	Inspektorat Jenderal | Inspektorat I	Tidak Dapat	Melakukan penggandaan data, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network) dan permasalahan perangkat teknologi informasi end user, pencatatan infrastruktur teknologi informasi, pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user, perekaman data dengan pemindaian, dengan validasi, dan tanpa validasi,validasi hasil perekaman data, query sederhana, konversi data, kompilasi data pengolahan, perekaman data spasial dan uji coba program multimedia interaktif	6.400.000	6.900.000
			1	Inspektorat Jenderal | Inspektorat II	Tidak Dapat	Melakukan penggandaan data, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network) dan permasalahan perangkat teknologi informasi end user, pencatatan infrastruktur teknologi informasi, pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user, perekaman data dengan pemindaian, dengan validasi, dan tanpa validasi,validasi hasil perekaman data, query sederhana, konversi data, kompilasi data pengolahan, perekaman data spasial dan uji coba program multimedia interaktif	6.400.000	6.900.000
	Pranata Komputer Terampil	D-III Teknik Informatika | D-III Rekayasa Perangkat Lunak	1	Inspektorat Jenderal | Inspektorat III	Tidak Dapat	Melakukan penggandaan data, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network) dan permasalahan perangkat teknologi informasi end user, pencatatan infrastruktur teknologi informasi, pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user, perekaman data dengan pemindaian, dengan validasi, dan tanpa validasi,validasi hasil perekaman data, query sederhana, konversi data, kompilasi data pengolahan, perekaman data spasial dan uji coba program multimedia interaktif	6.400.000	6.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
			1	Inspektorat Jenderal | Inspektorat V	Tidak Dapat	Melakukan penggandaan data, deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network) dan permasalahan perangkat teknologi informasi end user, pencatatan infrastruktur teknologi informasi, pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user, perekaman data dengan pemindaian, dengan validasi, dan tanpa validasi,validasi hasil perekaman data, query sederhana, konversi data, kompilasi data pengolahan, perekaman data spasial dan uji coba program multimedia interaktif	6.400.000	6.900.000
55	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D-III Administrasi | D-III Kesekretariatan | D-III Kepegawaian | D-III Manajemen | D-III Administrasi Pemerintahan | D-III Manajemen Sumber Daya Manusia | D-III Administrasi Perkantoran | D-III Ilmu Kepegawaian | D-III Administrasi Publik | D-III Administrasi Negara	27	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
		D-III Administrasi Negara | D-III Manajemen Sumber Daya Manusia	1	Sekretariat Jenderal | Biro Pengadaan Barang/Jasa	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
		D-III Manajemen | D-III Administrasi | D-III Manajemen Administrasi | D-III Teknik Komputer dan Informatika | D-III Administrasi Pemerintahan | D-III Teknik Komputer dan Jaringan | D-III Manajemen Perkantoran | D-III Teknik Komputer | D-III Manajemen Sumber Daya Manusia | D-III Kepegawaian | D-III Administrasi Negara | D-III Administrasi Publik | D-III Manajemen Informatika | D-III Ilmu Kepegawaian | D-III Administrasi Perkantoran | D-III Ilmu Komputer | D-III Manajemen Personalia | D-III Kesekretariatan | D-III Teknik Informatika | D-III Ilmu Komputer dan Sistem Informasi	1	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D-III Manajemen Sumber Daya Manusia | D-III Kesekretariatan | D-III Manajemen Administrasi | D-III Manajemen Perkantoran | D-III Administrasi Perkantoran | D-III Manajemen Personalia | D-III Manajemen | D-III Administrasi Negara | D-III Administrasi Publik	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Kebijakan Strategis	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
		D-III Manajemen Sumber Daya Manusia | D-III Kesekretariatan | D-III Manajemen Administrasi | D-III Manajemen Perkantoran | D-III Administrasi Perkantoran | D-III Teknik Komputer | D-III Manajemen Personalia | D-III Manajemen | D-III Administrasi Negara | D-III Manajemen Informatika | D-III Sistem Informasi | D-III Administrasi Publik | D-III Teknologi Informasi | D-III Teknik Informatika | D-III Teknologi Komputer	1	Sekretariat Jenderal | Biro Hukum	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
		D-III Manajemen Sumber Daya Manusia | D-III Kesekretariatan | D-III Manajemen Personalia	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Statistik | Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
		D-III Manajemen Sumber Daya Manusia | D-III Manajemen | D-III Administrasi Perkantoran | D-III Administrasi Pemerintahan | D-III Kesekretariatan | D-III Teknik Informatika | D-III Manajemen Informatika | D-III Ilmu Komputer	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Pontianak	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
		D-III Manajemen Sumber Daya Manusia | D-III Manajemen | D-III Administrasi Perkantoran | D-III Administrasi Pemerintahan | D-III Kesekretariatan | D-III Teknik Informatika | D-III Manajemen Informatika | D-III Ilmu Komputer | D-III Teknik Komputer	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sorong	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Boalemo	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Buleleng	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D-III Manajemen Sumber Daya Manusia | D-III Manajemen | D-III Administrasi Perkantoran | D-III Administrasi Pemerintahan | D-III Kesekretariatan | D-III Teknik Informatika | D-III Manajemen Informatika | D-III Ilmu Komputer | D-III Teknik Komputer	1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
			1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
		D-III Manajemen Sumber Daya Manusia | D-III Manajemen Perkantoran | D-III Manajemen Administrasi | D-III Administrasi Perkantoran | D-III Kesekretariatan | D-III Teknik Komputer | D-III Manajemen Personalia | D-III Manajemen | D-III Administrasi Negara | D-III Manajemen Informatika | D-III Sistem Informasi | D-III Administrasi Publik | D-III Teknologi Informasi | D-III Teknik Informatika | D-III Teknologi Komputer	1	Sekretariat Jenderal | Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
		D-III Sistem Informasi | D-III Administrasi Publik | D-III Manajemen	1	Sekretariat Jenderal | Biro Umum	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	6.400.000	6.900.000
56	Pustakawan Ahli Pertama	S-1 Ilmu Perpustakaan | S-1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi | D-IV Ilmu Perpustakaan	1	Sekretariat Jenderal | Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan kepustakawanan, yaitu meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan	8.000.000	8.500.000
			1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Statistik | Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan kepustakawanan, yaitu meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan	8.000.000	8.500.000
57	Statistisi Ahli Pertama	D-IV Ilmu Statistik | S-1 Matematika Terapan | S-1 Statistik | S-1 Matematika | D-IV Statistika | S-1 Statistika	1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Balai Penataan Ruang Laut Makassar	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Balai Penataan Ruang Laut Padang	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
			1	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
	Statistisi Ahli Pertama	D-IV Ilmu Statistik | S-1 Matematika Terapan | S-1 Statistik | S-1 Matematika Statistika | S-1 Matematika | D-IV Statistik | D-IV Statistika | S-1 Statistika	1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
		S-1 Matematika | S-1 Sains Data | S-1 Statistika	3	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
		S-1 Matematika | S-1 Statistik | S-1 Matematika Statistika | S-1 Sistem Informatika | D-IV Matematika	1	Sekretariat Jenderal | Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
		S-1 Matematika | S-1 Statistik | S-1 Sains Data	1	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
		S-1 Matematika | S-1 Statistika | S-1 Sains Data	1	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
		S-1 Matematika Bidang Minat Statistik | S-1 Ilmu Statistik | S-1 Statistika | S-1 Statistik Umum | S-1 Matematika Statistika | S-1 Matematika	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Kebijakan Strategis	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
		S-1 Statistik | S-1 Matematika Bidang Minat Statistik	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Informasi	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
		S-1 Statistik | S-1 Matematika Statistika | D-IV Matematika | S-1 Matematika	1	Sekretariat Jenderal | Biro Umum	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
		S-1 Statistika | S-1 Matematika | S-1 Sains Data	4	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
		S-1 Statistika | S-1 Matematika | S-1 Statistik | S-1 Statistika Terapan | D-IV Sains Data Terapan | S-1 Sains Data Spasial | S-1 Sains Data	1	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
		S-1 Statistika | S-1 Sains Data | S-1 Matematika	12	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Tidak Dapat	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik	8.000.000	8.500.000
58	Teknisi Akuakultur Terampil	D-III Perikanan Budidaya | D-III Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-III Budi Daya Kelautan | D-III Kimia | D-III Teknologi Budidaya Ikan | D-III Budi Daya Ikan | D-III Lingkungan | D-III Biologi | D-III Budidaya Perikanan	4	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	6.400.000	6.900.000
		D-III Perikanan Budidaya | D-III Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-III Budidaya Kelautan | D-III Kimia | D-III Teknologi Budidaya Ikan | D-III Budi Daya Ikan | D-III Lingkungan | D-III Biologi | D-III Budi Daya Perikanan	20	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya B	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	6.400.000	6.900.000
		D-III Perikanan Budidaya | D-III Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-III Budidaya Kelautan | D-III Kimia | D-III Teknologi Budidaya Ikan | D-III Budi Daya Ikan | D-III Lingkungan | D-III Biologi | D-III Budidaya Perikanan	33	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya A	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	6.400.000	6.900.000
	Teknisi Akuakultur Terampil	D-III Perikanan Budidaya | D-III Teknologi Manajemen Perikanan Budidaya | D-III Budidaya Kelautan | D-III Kimia | D-III Teknologi Budidaya Ikan | D-III Budi Daya Ikan | D-III Lingkungan | D-III Biologi | D-III Budidaya Perikanan	4	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	6.400.000	6.900.000
59	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	D-III Analis Kimia | D-III Biologi | D-III Budi Daya Ikan | D-III Budi Daya Kelautan | D-III Budi Daya Perikanan | D-III Kesehatan Lingkungan | D-III Kimia | D-III Perikanan Budidaya | D-III Teknologi Budidaya Perikanan | D-III Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-III Teknik Penanganan Patologi Perikanan	14	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya B	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	6.400.000	6.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Dapat Diisi Disabilitas	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
		D-III Analis Kimia | D-III Biologi | D-III Budi Daya Ikan | D-III Budi Daya Kelautan | D-III Budidaya Perikanan | D-III Kesehatan Lingkungan | D-III Kimia | D-III Perikanan Budidaya | D-III Teknologi Budidaya Perikanan | D-III Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-III Teknik Penanganan Patologi Perikanan	3	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya A	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	6.400.000	6.900.000
60	Widyaiswara Ahli Pertama	S-2 Manajemen | S-2 Akuntansi | S-2 Administrasi Publik | S-2 Kebijakan Publik | S-2 Ilmu Pemerintahan | S-2 Ilmu Komunikasi | S-2 Hubungan Internasional | S-2 Hukum | S-2 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-2 Perikanan Tangkap | S-2 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-2 Teknologi Akuakultur | S-2 Akuakultur | S-2 Budidaya Perairan | S-2 Teknologi Hasil Perikanan | S-2 Oseanografi | S-2 Teknologi Kelautan	5	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Pelatihan Aparatur Denpasar	Tidak Dapat	Melaksanakan kegiatan yang terdiri atas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan bahan pembelajaran, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran	8.500.000	8.800.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II Pengumuman
Nomor : B.1389/SJ/KP.310/XI/2026
Tanggal : 27 November 2026

RENCANA UNIT ORGANISASI PENEMPATAN
PADA UNIT ORGANISASI PENGELOMPOKAN DI DALAM SSCASN
PENGADAAN PNS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Jabatan	Unit Kerja Pengelompokan	Unit Kerja Penempatan	
1	Analis Akuakultur Ahli Pertama	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1. Direktorat Ikan Air Laut	9. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya
			2. Direktorat Ikan Air Payau	10. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
			3. Direktorat Ikan Air Tawar	11. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
			4. Direktorat Prasarana dan Sarana	12. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
			5. Direktorat Rumput Laut	13. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
			6. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau	14. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
			7. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar	15. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
			8. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut	16. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan
2	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan	17. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
			2. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru	18. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
			3. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar	19. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari
			4. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta	20. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
			5. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura	21. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju
			6. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado	22. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan Ii
			7. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram	23. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
			8. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I	24. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
			9. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya Ii	25. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya
			10. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang	26. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang
			11. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh	27. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
			12. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam	28. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
			13. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau	29. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
			14. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu	30. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
			15. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima	31. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate
			16. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon	32. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Unit Kerja Pengelompokan	Unit Kerja Penempatan	
3	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Pusat Manajemen Mutu	23. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau
			2. Pusat Mutu Pascapanen	24. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu
			3. Pusat Mutu Produksi Primer	25. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
			4. Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I	26. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon
			5. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar	27. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
			6. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon	28. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
			7. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan	29. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari
			8. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru	30. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
			9. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong	31. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai
			10. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung	32. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju
			11. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar	33. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan Ii
			12. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado	34. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
			13. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram	35. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
			14. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I	36. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya
			15. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang	37. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang
			16. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya Ii	38. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
			17. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang	39. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
			18. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan	40. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
			19. Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta	41. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
			20. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh	42. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan
			21. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung	43. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate
			22. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam	
4	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya A	1. Direktorat Ikan Air Laut	2. Direktorat Ikan Air Payau
		Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya B	1. Direktorat Ikan Air Tawar	9. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
			2. Direktorat Prasarana dan Sarana	10. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
			3. Direktorat Rumput Laut	11. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sei Gelam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Unit Kerja Pengelompokan	Unit Kerja Penempatan	
	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya B	4. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau	12. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
			5. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut	13. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
			6. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya	14. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
			7. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	15. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan
			8. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	
		Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1. Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	12. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
			2. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	13. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
			3. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	14. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
			4. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	15. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
			5. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	16. Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
			6. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	17. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
			7. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	18. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
			8. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	19. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
			9. Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	20. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
			10.Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	21. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
			11. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	22. Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
5	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya A	1. Direktorat Ikan Air Payau	8. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
			2. Direktorat Prasarana dan Sarana	9. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
			3. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau	10. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
			4. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar	11. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
			5. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut	12. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
			6. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya	13. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
			7. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	
6	Teknisi Akuakultur Terampil	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya A	1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau	5. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
			2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar	6. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
			3. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut	7. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
			4. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya	8. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan
		Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya B	1. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	4. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
			2. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	5. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
			3. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sei Gelam	
7	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya A	1. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut	3. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
			2. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya	
		Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya B	1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau	6. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
			2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar	7. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
			3. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	8. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
			4. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	9. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
			5. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	10. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran III Pengumuman
Nomor : B.1389/SJ/KP.310/XI/2026
Tanggal : 27 November 2026

RINCIAN KEBUTUHAN KHUSUS
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2026

Penyandang Disabilitas

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
1	Analis Data Ilmiah Ahli Pertama	S-1 Teknik Mesin dan Biosistem | S-1 Ilmu Kelautan	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Statistik | Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah	8.000.000	8.500.000
2	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Ilmu Administrasi Negara | S-1 Ilmu Administrasi Publik | S-1 Kebijakan Publik | S-1 Manajemen Publik | S-1 Pengembangan Sumber Daya Manusia | S-1 Pemerintahan | S-1 Informatika | D-IV Ilmu Administrasi Negara | D-IV Pemerintahan | D-IV Informatika	1	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya | Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	8.000.000	8.500.000
3	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Kearsipan | S-1 Ilmu Perpustakaan | S-1 Administrasi Perkantoran | D-IV Administrasi Perkantoran | D-IV Kearsipan | S-1 Akuntansi | S-1 Sistem Informasi | S-1 Sastra Indonesia	1	Sekretariat Jenderal | Biro Umum	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	8.000.000	8.500.000
4	Penata Perizinan Ahli Pertama	S-1 Manajemen | S-1 Akuntansi | S-1 Ekonomi Syariah | S-1 Desain Komunikasi Visual | S-1 Geografi	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Informasi	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan	8.000.000	8.500.000
5	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	S-1 Ilmu Hukum | S-1 Hukum	1	Sekretariat Jenderal | Biro Hukum	Mengumpulkan data dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan penyusunan instrumen hukum lainnya	8.000.000	8.500.000
6	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Sistem Informasi | S-1 Teknik Informatika | S-1 Sistem Komputer | S-1 Desain Komunikasi Visual	1	Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Informasi	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	8.000.000	8.500.000

Putra-Putri Papua

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
1	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	D-III Biologi | D-III Perikanan | D-III Ilmu Gizi | D-III Teknologi Pangan dan Gizi | D-III Teknologi Pangan | D-III Kimia | D-III Teknologi Hasil Perikanan | D-III Budi Daya Ikan | D-III Budidaya Perikanan | D-III Teknik Pengolahan Produk Perikanan | D-III Teknik Budidaya Perikanan | D-III Teknik Penanganan Patologi Perikanan | D-III Pengolahan Hasil Laut | D-III Perikanan Tangkap | D-III Teknik Penangkapan Ikan | D-III Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	6.400.000	6.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
2	Asisten Penyuluh Perikanan Terampil	D-III Teknik Budidaya Perikanan | D-III Teknik Pengolahan Produk Perikanan | D-III Agribisnis Perikanan | D-III Mekanisasi Perikanan | D-III Teknik Penanganan Patologi Perikanan | D-III Teknik Penangkapan Ikan | D-III Teknik Kelautan | D-III Budi Daya Ikan | D-III Pengolahan Hasil Laut | D-III Perikanan Tangkap | D-III Teknologi Kelautan | D-III Permesinan Kapal	5	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sorong	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan	6.400.000	6.900.000
3	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	D-IV Teknologi Pangan dan Gizi | S-1 Ilmu Gizi | D-IV Ilmu Gizi | D-IV Perikanan | D-IV Biokimia | S-1 Teknologi Pangan dan Gizi | S-1 Kimia | S-1 Biokimia | S-1 Mikrobiologi | D-IV Bioteknologi | S-1 Teknologi Pangan | S-1 Bioteknologi | S-1 Biologi | D-IV Biologi | S-1 Perikanan | D-IV Kimia | D-IV Teknologi Pangan | D-IV Mikrobiologi | S-1 Budidaya Perairan | S-1 Akuakultur | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-IV Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | S-1 Teknologi Hasil Perairan | D-IV Bioteknologi Perikanan | D-IV Teknologi Akuakultur | D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | S-1 Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | D-IV Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | D-IV Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | S-1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap	3	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan	8.000.000	8.500.000
4	Juru Masak Kapal Kelas II	SUPM Perikanan | SLTA | SMU | SMK | SMK Pelayaran | SMK Tata Boga	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	menyiapkan logistik makanan, minuman dan peralatan dapur serta penyimpanan dan pengadaan logistik makanan baik selama berlayar maupun berlabuh dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah teritorial dan ZEE perairan Indonesia dengan Kapal Pengawas Perikanan	5.600.000	5.900.000
5	Kelasi Kapal Kelas II	D-III Teknologi Penangkapan Ikan | D-III Teknik Penangkapan Ikan | D-III Perikanan Tangkap	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	menyiapkan, merawat, memelihara perlengkapan/alat kapal pengawas dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar maupun bersandar dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta penegakan hukum di laut	5.600.000	5.900.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan	Deskripsi Jabatan	Gaji Minimal	Gaji Maksimal
6	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	D-IV Arkeologi | D-IV Antropologi | D-IV Ekonomi Sumber Daya | D-IV Geologi | D-IV Oseanografi | S-1 Arkeologi | S-1 Ekonomi Sumber Daya Kelautan | S-1 Geologi | S-1 Oseanografi | S-1 Ilmu Atau Sains Kelautan | D-IV Biologi | D-IV Ilmu Atau Sains Perikanan | D-IV Akuakultur | S-1 Akuakultur | S-1 Pengolahan Sumber Daya Perikanan | D-IV Perikanan Tangkap | S-1 Perikanan Tangkap | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Perencanaan Wilayah | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Permesinan Perikanan | D-IV Teknologi Akuakultur | S-1 Hukum	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.600.000	7.800.000
		S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | S-1 Lingkungan | S-1 Planologi | S-1 Perikanan | S-1 Geografi | S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 Oceanografi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Kelautan | S-1 Penginderaan Jauh | S-1 Biologi	3	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Loka Penataan Ruang Laut Sorong	Melakukan analisa bahan di bidang perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	7.600.000	7.800.000
7	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	S-1 Teknologi Hasil Perairan | S-1 Akuakultur | S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan | D-IV Sosial Ekonomi Perikanan | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Perikanan Tangkap | D-IV Ilmu Hukum | S-1 Teknologi Hasil Perikanan | D-IV Sumber Daya Akuatik | S-1 Manajemen / Pengelolaan Sumber Daya Perairan | D-IV Perikanan | D-IV Teknologi Hasil Perairan | S-1 Perikanan Tangkap | S-1 Manajemen | D-IV Ilmu Kelautan | D-IV Akuakultur | D-IV Teknologi Hasil Perikanan | S-1 Ilmu Hukum | S-1 Perikanan | D-IV Ilmu Lingkungan | D-IV Permesinan Perikanan | D-IV Teknik Kelautan | D-IV Pengolahan Hasil Perikanan	1	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pengawasan sumber daya perikanan, meliputi perencanaan pengawasan perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengwasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanaan, pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan dan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan	8.000.000	8.500.000
8	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	S-1 Geografi Lingkungan | S-1 Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati | D-IV Manajemen Atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan | S-1 Teknik Atau Rekayasa Geodesi | S-1 Perencanaan Wilayah | S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 Kelautan | D-IV Ilmu Atau Sains Kelautan | S-1 Teknik | S-1 Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S-1 Lingkungan | S-1 Biologi | S-1 Geografi | S-1 Kartografi dan Penginderaan Jauh | S-1 Oceanografi | S-1 Teknik Atau Rekayasa Kelautan	4	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | Loka Penataan Ruang Laut Sorong	Melakukan inventarisasi dan identifikasi informasi peta, citra satelit serta hasil survey untuk menghasilkan bahan : peta tematik; peta alokasi pemanfaatan ruang; peta kesesuaian pemanfaatan ruang; rencana pemanfaatan kawasan konservasi; rencana pelibatan masyarakat; rencana desain survey; rencana pemanfaatan konservasi jenis ikan; rencana pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; peta risiko/kerentanan bencana, gempa bumi, tsunami, dan geologis	8.000.000	8.500.000
9	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	D-IV Penyuluhan Perikanan | D-IV Permesinan Perikanan | D-IV Teknologi Akuakultur | D-IV Teknologi Penangkapan Ikan | D-IV Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan | D-IV Teknologi Hasil Perikanan	15	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sorong	Melaksanakan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan	8.000.000	8.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara